



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menyebutkan bahwa Anggota Sub Gugus Tugas menyusun rencana program/kegiatan tahunan kementerian/lembaga masing-masing dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. bahwa pemenuhan hak anak usia dini harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait agar setiap anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
 - c. bahwa dalam upaya melaksanakan strategi pengembangan anak usia dini melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI guna mencapai target sasaran dalam pengembangan anak usia dini, maka perlu menyusun dokumen RAD PAUD HI sebagai pedoman perencanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Probolinggo Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 146);
 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
21. Peraturan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 35);

25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 48);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);
28. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 36);
29. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Prrobolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 131);
30. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 135 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022-2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Probolinggo.
5. Camat adalah Camat di Kota Probolinggo.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.
10. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
13. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

14. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD dan BKB).
15. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat RAD PAUD HI adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD PAUD HI merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pengembangan anak usia dini melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI di Kota Probolinggo.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RAD PAUD HI adalah menghasilkan dokumen rencana aksi Daerah untuk mencapai target sasaran dalam pengembangan anak usia dini.

Pasal 4

Tujuan RAD PAUD HI adalah :

- a. memastikan PAUD HI menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait agar setiap anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia; dan
- b. memberikan arahan dalam pengembangan kelembagaan yang relevan, terkoordinasi antar dan lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan anak usia dini.

BAB IV BIDANG LAYANAN PAUD HI

Pasal 5

Bidang layanan yang harus dintegrasikan dalam indikator capaian PAUD HI adalah :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini; dan
- d. Bidang Tata Kelola.

BAB V
RAD PAUD HI
Pasal 6

1) Sistematika penulisan RAD PAUD HI Tahun 2022-2024 terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Analisis Situasi dan Tantangan

BAB III : Tujuan, Arah Kebijakan, Sasaran dan Indikator Capaian

BAB IV : Tata Kelola

BAB V : Penutup

Lampiran

2) RAD PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3) RAD PAUD HI Tahun 2022-2024 dijabarkan dalam Matrik RAD PAUD HI Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 7

Pendanaan RAD PAUD HI Tahun 2022-2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

1) Pemantauan dan evaluasi bertujuan menilai capaian target indikator pada Matrik RAD PAUD HI Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.

3) Hasil pemantauan dan evaluasi wajib dilaporkan kepada Ketua Gugus Tugas PAUD HI paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Agustus 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H, M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF KOTA
PROBOLINGGO TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kemajuan suatu bangsa. Setiap negara menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Salah satu bagian dalam pembangunan sumber daya manusia yang penting untuk mendapat perhatian adalah pembangunan anak usia dini. Kualitas anak usia dini menentukan kualitas manusia pada usia selanjutnya. Oleh karena itu, anak usia dini perlu dikembangkan agar maksimal seluruh potensi yang ada pada dirinya.

Pengembangan anak usia dini yang berkualitas telah diakui secara luas sebagai investasi utama terpenting dalam pengembangan manusia di Indonesia. Usia dini seorang anak mencakup sejak masih janin hingga usia 6 tahun merupakan periode yang sangat penting bagi perkembangan intelektual, emosi dan sosial anak. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara Holistik Integratif sangat menentukan pencapaian kualitas kesehatan, kecerdasan dan kematangan sosial di tahap berikutnya.

Pengembangan Anak Usia Dini yang menyeluruh (Holistik) dan terpadu (Integratif) dikenal dengan istilah PAUD HI merupakan pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis, sehingga anak dapat tumbuh serta berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pada periode terbaik dalam siklus kehidupan manusia tersebut, pemerintah telah menerbitkan kebijakan PAUD HI yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi. Adapun tujuan PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI

menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Peningkatan kualitas SDM sejak usia dini juga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Payung hukum tersebut mengatur Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain kesehatan dan pendidikan anak usia dini. Dua bidang tersebut sangat menentukan kualitas anak usia dini. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengamanatkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan PAUD HI dan bertanggung jawab untuk :

1. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
2. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
3. melakukan supervise atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
4. melakukan advokasi;
5. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan tenaga pelayanan; dan
6. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Oleh karena itu, semestinya pemenuhan layanan dasar kepada anak usia dini oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dimulai dari 1000 HPK dan dilanjutkan sampai anak berusia 6 tahun secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.

Pengembangan anak usia dini yang berkualitas merupakan investasi utama dan penting dalam pengembangan manusia. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh (Holistik) dan terpadu (Integratif) sangat menentukan kualitas anak usia dini.

Selain regulasi yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI), yang merupakan Peta Jalan (**Road-map**) Nasional PAUD HI yang selanjutnya diharapkan pula dapat menjadi acuan utama apabila Daerah menyusun RAD PAUD HI.

Berdasarkan hal-hal inilah dipandang perlu penyusunan turunan kebijakan oleh Daerah untuk menterjemahkan kebijakan bagi anak usia dini yang berkelanjutan dengan perumusan serta penetapan RAD PAUD HI Tahun 2022-2024 sebagai arah pembangunan PAUD HI serta panduan koordinasi Pemerintah Kota Probolinggo dengan Perangkat Daerah terkait karena banyaknya aktivitas dalam pengembangan anak usia dini yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berbeda-beda yang memerlukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi kegiatan antar Perangkat Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RAD PAUD HI adalah menghasilkan dokumen Rencana Aksi Daerah untuk mencapai sasaran dalam Pengembangan Anak Usia Dini.

Sedangkan tujuan penyusunan RAD PAUD HI, antara lain :

1. memastikan PAUD HI menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait agar setiap anak usia dini di Kota Probolinggo dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;
2. memberikan arahan dalam pengembangan kelembagaan yang relevan, terkoordinasi antar dan lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan anak usia dini di Kota Probolinggo; dan
3. memberikan arahan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik di Kota Probolinggo.

Berikut ini kami sajikan tujuan dan sasaran PAUD HI sebagaimana gambar di bawah ini, dapat menjadikan pemahaman kita bersama.



1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 b ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Kemensos;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD 2013;
16. Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
17. Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
22. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif;
23. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Probolinggo Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo;
25. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Probolinggo;
26. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 135 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Probolinggo.

1.4 Pengertian Konseptual

Konsep PAUD HI merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara **simultan, sistematis dan terintegrasi**”.

Simultan dipahami sebagai kebijakan terhadap anak usia dini yang mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan dan pengasuhan secara bersamaan. Kebutuhan esensial anak usia dini dilayani secara sistematis oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait. Terintegrasi dimaksudkan sebagai kebijakan pengelolaan pengembangan anak usia dini yang dilakukan berbagai Perangkat Daerah saling terkait dan selaras antar lembaga pelayanan. Untuk itu dibutuhkan perwujudan komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya PAUD HI.

Adapun ruang lingkup dokumen ini mencakup analisis situasi, tantangan, sasaran, rencana aksi dan mekanisme pelaksanaan serta matriks rencana aksi, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1.2 Pengertian Konseptual PAUD HI sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013

BAB II

ANALISIS SITUASI DAN TANTANGAN

2.1 Analisis Situasi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini

Pertumbuhan merupakan hal yang berkaitan dengan masalah perubahan ukuran (berat badan) dan jumlah (tinggi badan). Sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan individu dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosial emosional dan kemandirian.

Tahapan tumbuh kembang (*development milestone*), yaitu titik panduan untuk memahami tahapan dimana anak berada, dan apakah ia sudah mengalami kemajuan belajar yang semestinya. Tahap perkembangan seorang anak memiliki pola yang teratur dan berurutan, serta tahapan tersebut tidak bisa terjadi terbalik, misalnya anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum berjalan dan sebagainya.

Tindakan pencegahan gangguan perkembangan merupakan antisipasi agar anak usia dini berkembang lebih optimal dan maksimal. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini, yaitu :

1. Faktor internal, meliputi faktor genetik. Melalui genetik yang berada dalam sel telur yang dibuahi dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya.
2. Faktor eksternal, utamanya faktor lingkungan sangat menentukan tercapainya potensi genetik yang optimal. Faktor eksternal sendiri meliputi faktor lingkungan prenatal dan pasca natal. Faktor lingkungan prenatal diantaranya adalah gizi ibu hamil, stress, infeksi, endrokin, radiasi, toksin. Sedangkan pascanatal diantaranya adalah lingkungan biologis (umur, penyakit, dan kebersihan), lingkungan fisik (faktor cuaca dan keadaan geografis), faktor psikososial (motivasi dan kasih sayang), faktor keluarga dan adat istiadat (pendapatan orang tua dan norma yang berlaku).

Selanjutnya, kami sajikan gambaran umum kondisi anak usia dini di Kota Probolinggo sebagaimana sub-sub bab berikut ini :

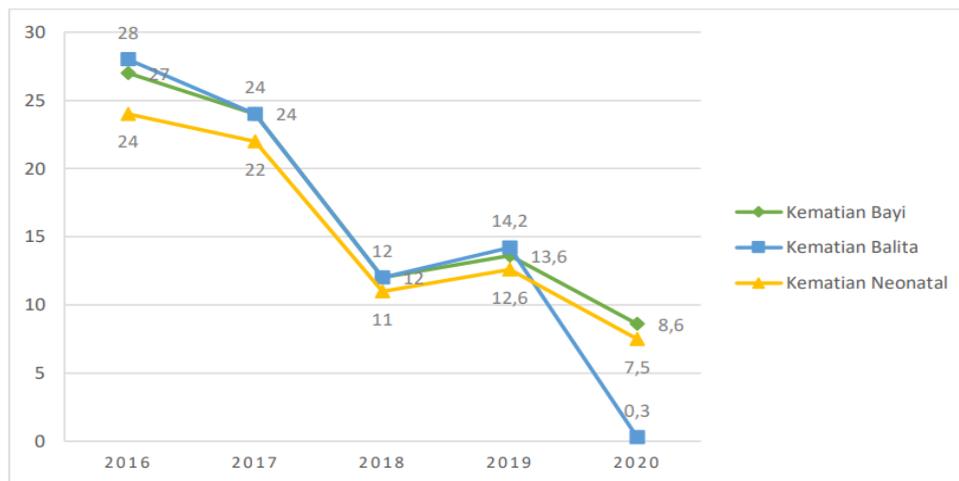
2.1.1 Kesehatan dan Gizi

WHO menyatakan definisi kesehatan adalah keadaan sempurna secara fisik, mental dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan. Kesehatan sosial diartikan kemampuan seseorang dalam hidup bersama di dalam suatu kelompok masyarakat (*American Heritage College Dictionary*, 1997 dalam Nies & McEwen, 2001). Dengan demikian kesehatan dapat disimpulkan keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual tidak hanya bebas dari penyakit, kelemahan dan kecacatan yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992).

Indikator yang bisa digunakan untuk melihat derajat kesehatan dan gizi adalah Angka Kematian. Angka Kematian yang berkaitan dengan anak usia dini adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABa), Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKaBa) dan Angka Kematian Neonatal (AKN)

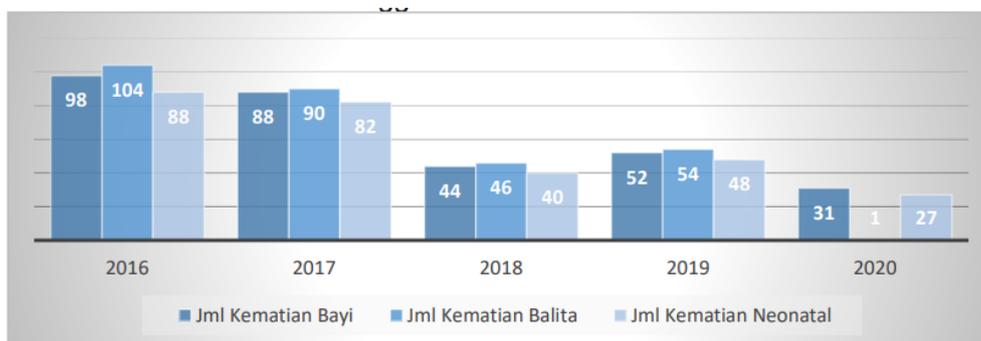
Gambar 2.1. Tren angka kematian Bayi, Balita dan Neonatal di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021.

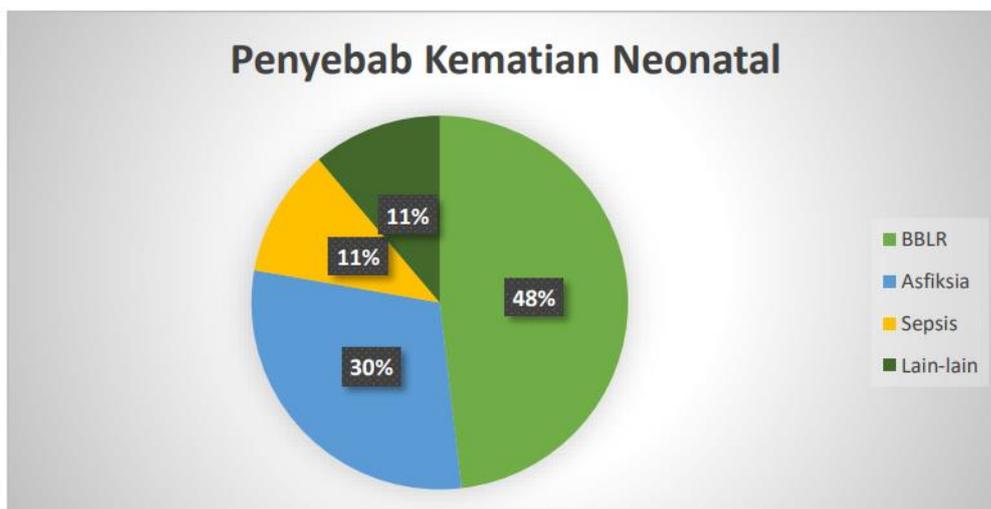
Secara umum angka kematian bayi, balita, dan Neonatal di Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Sedangkan dalam SDG's AKB sebisa mungkin diturunkan sekurang-kurangnya menjadi 12 kematian per 1000 kelahiran hidup, AKB Kota Probolinggo Tahun 2020 adalah 8,6 kematian per 1000 kelahiran hidup, angka ini sudah di bawah dari yang ditargetkan dalam SDG's sehingga perlu mempertahankan angka kematian bayi agar tidak meningkat.

Gambar 2.2 Jumlah Kematian Bayi, Balita dan Neonatal Kota Probolinggo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

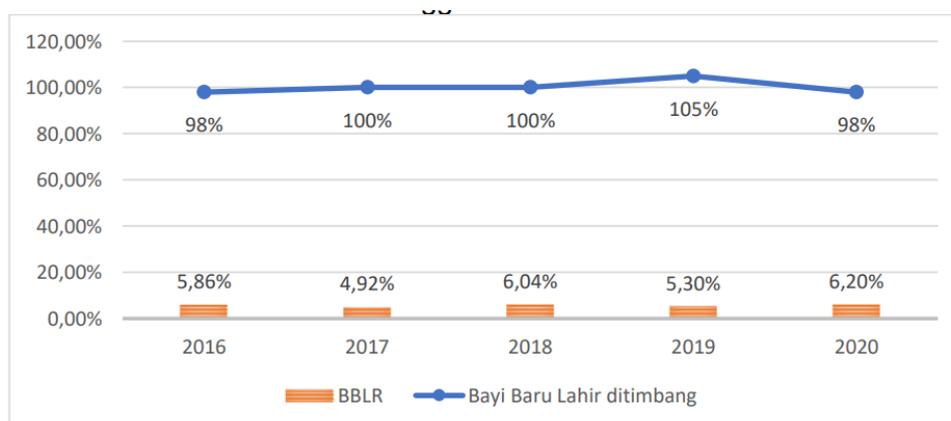
Gambar 2.3. Penyebab Kematian Neonatal Kota Probolinggo Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Penyebab terbanyak kematian Post Neonatal di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 adalah karena BBLR. Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir mempunyai berat badan Kurang dari 2,5 Kg (atau 2500 gram) yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Formula presentase BBLR-nya dihitung dengan membagi jumlah bayi dengan BBLR di suatu wilayah dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup di wilayah tersebut dalam kurung waktu tertentu. Adanya BBLR karena disebabkan kekurangan gizi pada masa kehamilan dan akan mempunyai resiko tinggi terhadap kematian pada umur yang sangat dini atau lebih lanjut cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan di bawah normal.

Gambar 2.4. Persentase Bayi Baru Lahir Ditimbang dan BBLR Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

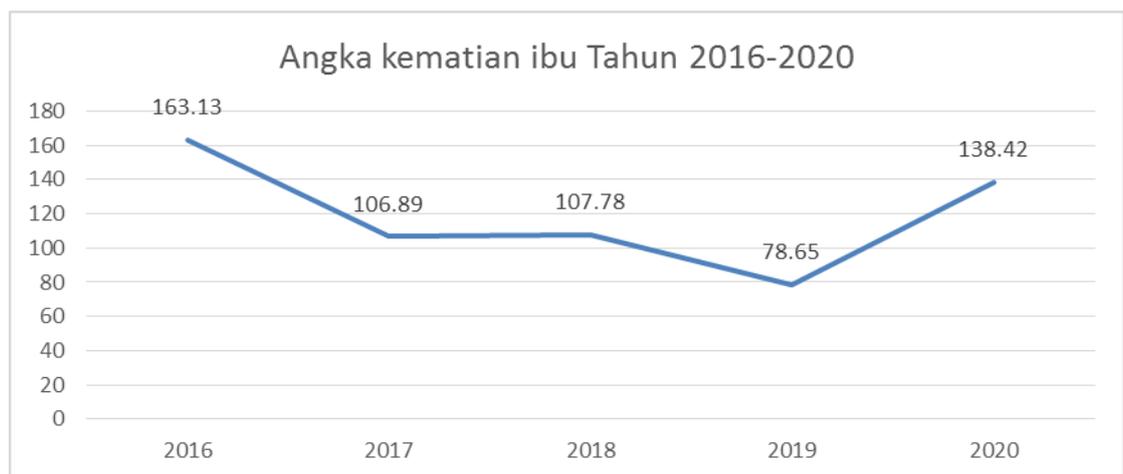


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021.

Persentase Bayi Baru Lahir yang ditimbang di Kota Probolinggo selama 4 tahun terakhir meningkat, hal ini menunjukkan pelayanan Kesehatan anak yang sesuai standar. Namun capaian ini menurun pada Tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan pelayanan kesehatan selama masa pandemi. Sedangkan untuk BBLR yang ditemukan selama 5 tahun terakhir persentasenya fluktuatif namun pada Tahun 2020 persentasenya meningkat dari tahun sebelumnya.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu dihitung dengan perbandingan setiap 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2016 angka kematian ibu Kota Probolinggo cukup tinggi yaitu 163,13 per 100.000 kelahiran hidup. Hingga tahun 2019 sudah memiliki tren yang baik dengan penurunan yang cukup signifikan hingga menjadi 78,65 pada 100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2020 AKI Kota Probolinggo meningkat kembali dengan cukup tajam hingga 138,42 kelahiran hidup. Peningkatan yang AKI yang cukup signifikan merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang cukup mengganggu layanan pemerintahan, khususnya di bidang kesehatan.



Gambar 2.5. Angka Kematian Ibu Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

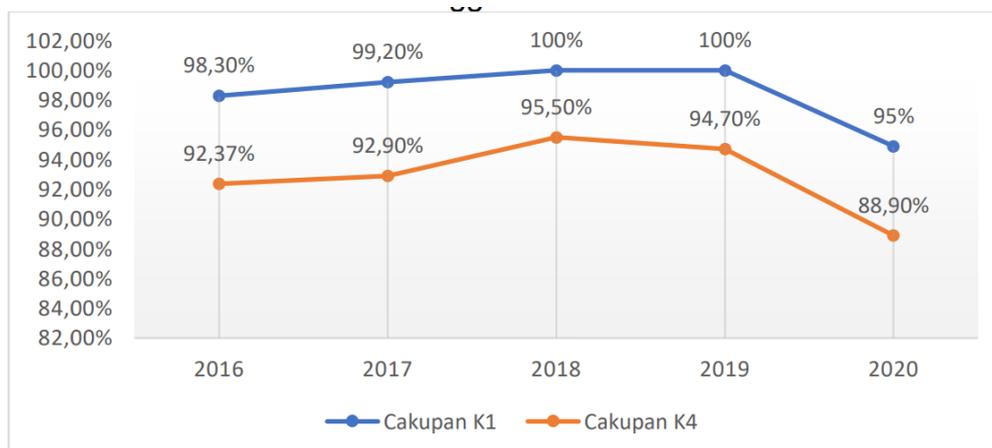
Pada Tahun 2020 terjadi kenaikan Jumlah Kematian Ibu dari 3 kematian menjadi 5 kematian dan Angka Kematian Ibu (AKI) 78,65 per 100.000 kelahiran hidup naik menjadi 138,42 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih diatas dari target yang ditentukan oleh *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup sehingga Pemerintah Kota Probolinggo perlu melakukan berbagai upaya untuk menurunkan AKI.

Adapun penyebab kematian Ibu yang dilaporkan antara lain karena pendarahan dan sebab lain, diantaranya TB Paru, *solutio*, sesak nafas, *cardiac*

arrest, covid 19. Selain itu, pembatasan kunjungan pemeriksaan kehamilan selama masa pandemi juga mempengaruhi monitoring terhadap ibu hamil yang beresiko tinggi. Untuk mempercepat penurunan AKI dilakukan upaya yang menjamin agar setiap ibu dapat mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil diberikan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, kedua, dan ketiga. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar 2.6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

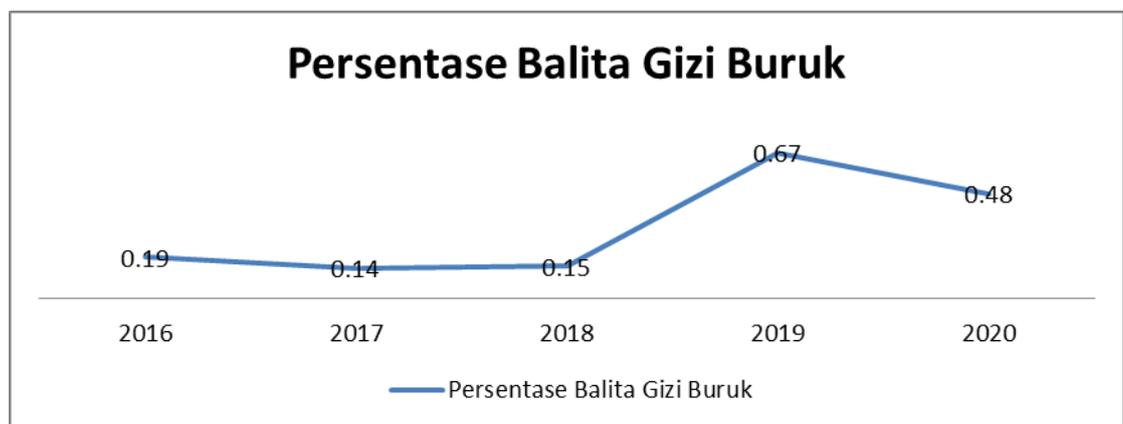


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021.

Selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 cenderung meningkat. Namun pada Tahun 2020 cakupan ini menurun dikarenakan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dengan adanya pandemi covid-19. Adanya pembatasan kunjungan ibu hamil, setiap ibu hamil yang akan melakukan pemeriksaan langsung ke tenaga kesehatan harus membuat janji terlebih dahulu. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diharapkan mencapai 100% sehingga masih diperlukan upaya lebih untuk mencapainya.

c. Jumlah Gizi Buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Berikut adalah grafik mengenai persentase balita gizi buruk di Kota Probolinggo, yakni :



Gambar 2.7. Persentase Balita Gizi Buruk Kota Probolinggo Tahun 2016 - 2020

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Untuk persentase balita gizi buruk tahun 2016 sebanyak 0,19% kemudian menurun menjadi 0,14% pada tahun 2017 dan 0,15% pada tahun 2018. Persentase balita gizi buruk meningkat menjadi 0,67% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 persentase balita gizi buruk menjadi 0,48%. Walaupun rata-rata dalam 5 tahun ada peningkatan namun persentasenya masih di bawah 1% (sebesar 0,07). Data-data di atas menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya masif yang bekerja sama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan.

Jumlah gizi buruk di Kota Probolinggo dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2016 kasus gizi buruk pada balita sebanyak 36 kasus kemudian menurun menjadi 27 kasus pada 2017, meningkat menjadi 29 pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 39 kemudian menjadi 82 kasus pada tahun 2020. Situasi ini perlu menjadi perhatian dengan meningkatkan layanan pengentasan gizi buruk.

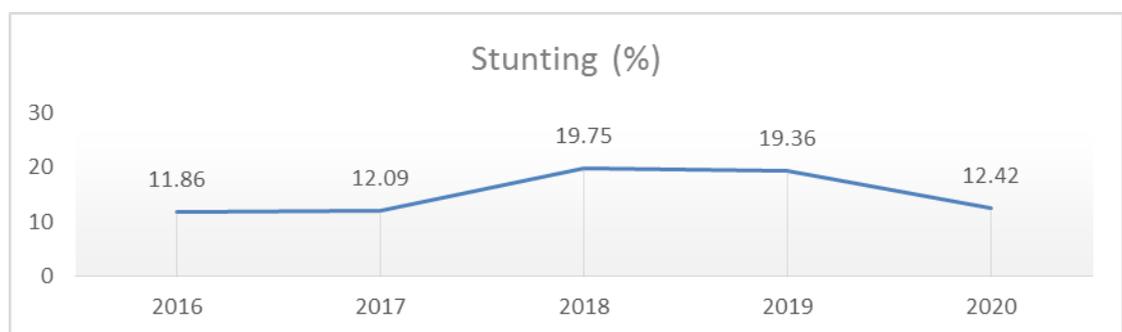


Gambar 2.8. Jumlah Gizi Buruk Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

d. Stunting

Berbeda dengan angka gizi buruk, ketercapaian indikator persentase stunting di Kota Probolinggo fluktuatif namun menunjukkan tren yang positif karena persentasenya berhasil ditekan terlebih dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018 persentasenya meningkat dari 12,09% menjadi 19,75% kemudian menurun menjadi 19,36% pada tahun 2019, menurun menjadi 19.36% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 12.42% pada tahun 2020.



Gambar 2.9. Angka Stunting Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

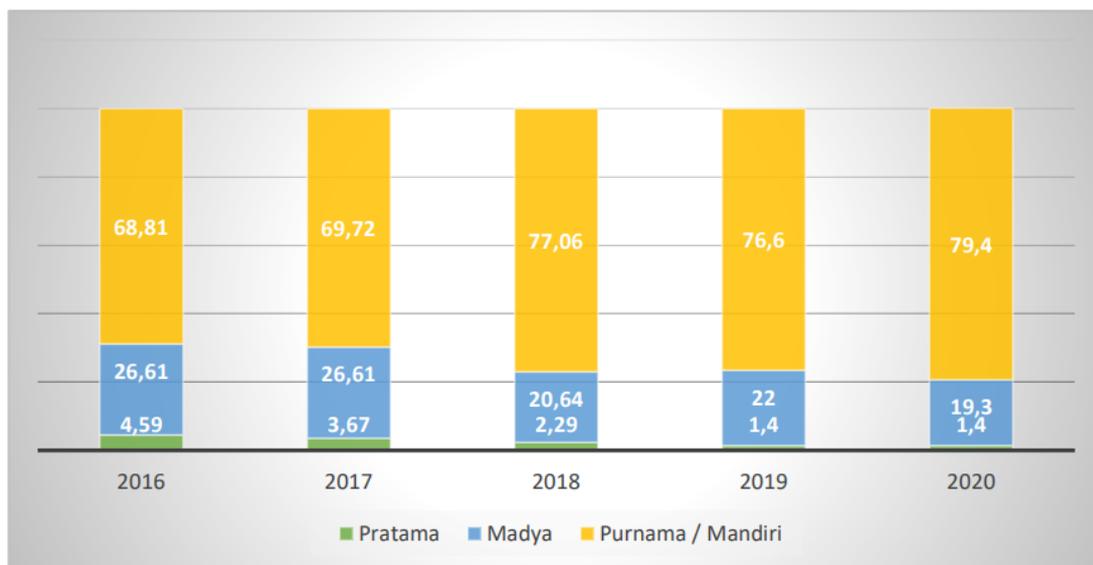
Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Lembaga sektor kesehatan yang terlibat dalam memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir sampai usia 2 (dua) tahun adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu dibentuk sebagai program

yang dipimpin oleh komunitas. Namun sebagai lembaga yang bersifat sukarela, mutu posyandu tetap diperhatikan karena mutu posyandu ini akan mempengaruhi dalam perbaikan angka imunisasi, status gizi dan hasil lain dari pelayanan anak usia dini.

Salah satu upaya yang telah dilakukan di Kota Probolinggo dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan bayi serta balita antara lain dengan revitalisasi dan pengembangan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan preventif dan promotif bagi ibu hamil dan bayi.

Gambar 2. 10. Prosentase strata posyandu di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Jumlah Posyandu di Kota Probolinggo tidak meningkat setiap tahunnya, namun persentase Posyandu Purnama atau Mandiri di Kota Probolinggo selama 5 Tahun terakhir semakin meningkat walaupun terjadi pandemi covid-19 dikarenakan adanya regenerasi kader, pencatatan dan pelaporan semakin lengkap, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Berikut ini disampaikan kondisi Posyandu pada tahun 2020 :

Tabel 2.1. Jumlah Posyandu berdasarkan strata dan kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2020

NO	KEC	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU									POSYANDU AKTIF*	
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		TOTAL	Σ	%
			Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mayangan	Sukabumi	0	0.0	2	12.5	3	18.8	11	68.8	16	14	87.5
		Jati	0	0.0	9	23.1	27	69.2	3	7.7	39	30	76.9
2	Kanigaran	Kanigaran	0	0.0%	13	22.8%	32	56.1%	12	21.1%	57	44	77.2
3	Kedopok	Kedopok	0	0.0%	8	21.6%	26	70.3%	3	8.1%	37	29	78.4
4	Wonoasih	Wonoasih	3	8.8%	6	17.6%	21	61.8%	4	11.8%	34	25	73.5
5	Kademangan	Ketapang	0	0.0%	4	11.4%	29	82.9%	2	5.7%	35	31	88.6
JUMLAH (KAB/KOTA)			3	1.4	42	19.3	138	63.3	35	16.1	218	173	79.4
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA											1.2		

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021.

Kualitas kesehatan ibu dan anak dipengaruhi juga oleh lingkungan dan ketahanan mereka terhadap penyakit menular dan tidak menular. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan ibu dan anak :

a. Cakupan Imunisasi

Di Indonesia, setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR. Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul. Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada Bayi di Kota Probolinggo Tahun 2020 sebesar 93,99% capaian ini sudah diatas 80%.

Gambar 2. 11. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kota Probolinggo Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021.

Dari imunisasi dasar yang diwajibkan tersebut, campak/MR menjadi salah satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada global untuk turut serta dalam eliminasi campak dan pengendalian rubela pada tahun 2020 dengan mencapai cakupan campak minimal 95% di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita dan infeksi rubela menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi rubela. Dengan demikian pencegahan campak dan rubela memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan kematian pada balita.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur ketercapaian imunisasi dasar lengkap bagi bayi adalah cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI). Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa atau kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B 4 kali, Polio 4 kali dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standart Pelayanan Minimal Nasional menetapkan target 100% desa/kelurahan. Secara lebih lengkap capaian UCI di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kota Probolinggo Tahun 2020

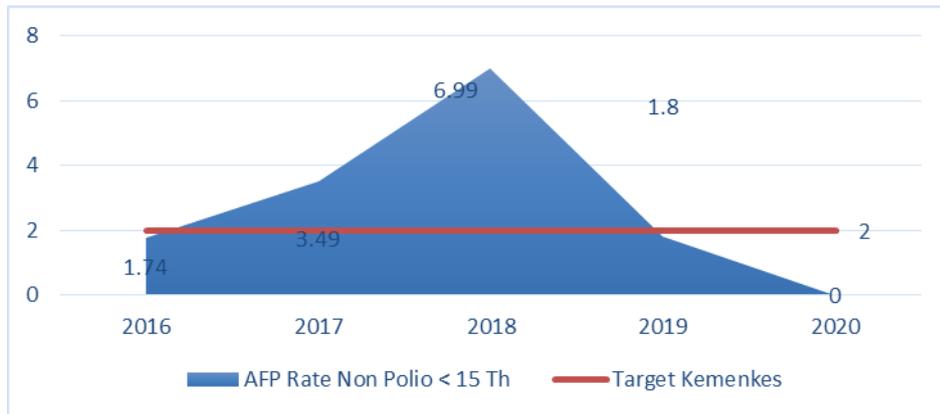
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DESA/ KELURAHAN UCI	% DESA/ KELURAHAN UCI
1	2	3	4	5	6
1	Mayangan	Sukabumi	2	0	0.0
		Jati	3	3	100.0
2	Kanigaran	Kanigaran	6	3	50.0
3	Kedopok	Kedopok	6	3	50.0
4	Wonoasih	Wonoasih	6	4	66.7
5	Kademangan	Ketapang	6	6	100.0
JUMLAH (KAB/KOTA)			29	19	65.5

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Probolinggo, 2021

Berikut ini penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain :

- Polio dan *Acute Flaccid Paralysis (AFP)*/Lumpuh Layu Akut. Berikut ini grafik penemuan kasus AFP < 15 tahun di Kota Probolinggo :

Gambar 2.12. *Acute Flaccid Paralysis (AFP)* non polio per 100.000 Penduduk <15 tahun Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

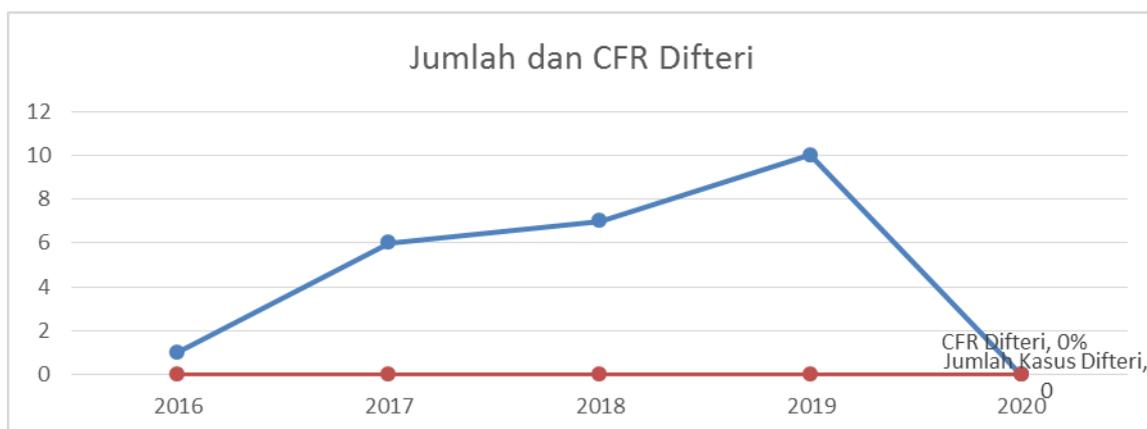


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

- Difteri

Penyakit difteri dapat menyerang orang yang tidak mempunyai kekebalan, terutama pada anak-anak (1-10 tahun).

Gambar 2.13. Jumlah dan *Case Fatality Rate (CFR)* Difteri Kota Probolinggo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Seiring munculnya Kasus Luar Biasa (KLB) Difteri pada Bulan Desember Tahun 2017 jumlah kasus difteri di Kota Probolinggo juga meningkat sampai dengan Tahun 2019 namun sudah tidak ditemukan kasus difteri baru pada Tahun 2020.

- Pertusis dan Hepatitis B

Tidak ada kasus pertusis di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 sedangkan kasus hepatitis B sebanyak 56 kasus yang keseluruhan penderitanya berjenis kelamin perempuan.

- *Tetanus neonatorum*

Tidak ada kasus *tetanus neonatarum* di Kota Probolinggo selama 5 tahun.

- Campak

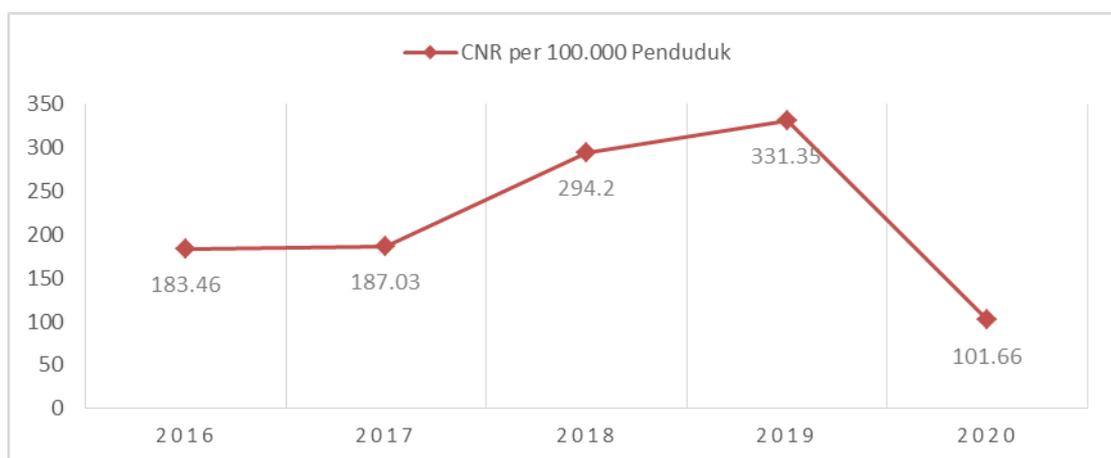
Pada tahun 2020, hanya ada 1 suspek campak yang ditemukan di Kota Probolinggo yaitu di Kecamatan Kademangan. Insiden rate suspek campak menggambarkan rate suspek campak di tiap 100.000 penduduk. Angka insiden rate suspek campak Kota Probolinggo Tahun 2020 adalah 0,4 per 100.000 penduduk.

b. Upaya penanganan penderita penyakit menular

- Tuberkolosis (TBC)

Pada Tahun 2020 di Kota Probolinggo sebanyak 1.409 orang terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dari total 4.492 orang terduga, sehingga persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 adalah 14,61%, cakupan ini lebih rendah dari Tahun 2019 yaitu 31,4%. dikarenakan selama masa pandemi pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan secara normal dikarenakan pandemic Covid 19 yang masih terjadi.

Gambar 2.14. Angka Notifikasi semua kasus Tuberkolosis Kota Probolinggo per 100.000 Penduduk tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Case Notification Rate (CNR) atau Angka Notifikasi semua Kasus Tuberkolosis adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan

dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah. CNR tuberkulosis Kota Probolinggo pada 4 tahun terakhir selalu meningkat dengan capaian pada Tahun 2019 sebesar 331,35 per 100.000 penduduk lalu menurun pada Tahun 2020 menjadi sebesar 101,66.

Case Detection Rate (CDR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus baru tuberkulosis. CDR menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program. Pada Tahun 2020 di Kota Probolinggo, *Case Detection Rate* (CDR) tuberkulosis menunjukkan angka 27,3% capaian ini sangat rendah dibandingkan Tahun 2019 yaitu 94,% dan jauh dari memenuhi angka CDR yang direkomendasikan WHO sebesar $\geq 90\%$. Rendahnya CDR tuberkulosis di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 disebabkan oleh tracing penderita TB yang rendah pada masa pandemic Covid 19.

Pada Tahun 2020 di Kota Probolinggo Cakupan Penemuan Kasus TB anak 43,07% cakupan ini menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 61,88%, penurunan ini antara lain disebabkan oleh pembatasan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan untuk penemuan kasus melalui investigasi kontak dikarenakan situasi pandemi.

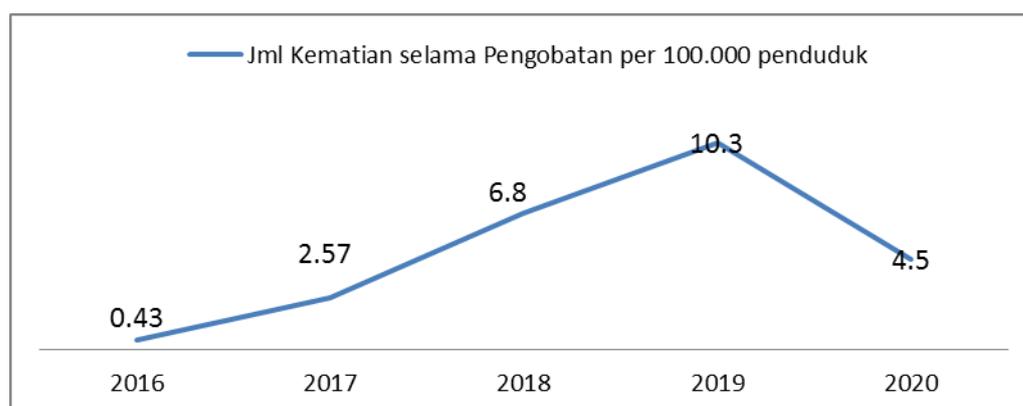
Angka kesembuhan tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis pada tahun 2020 adalah sebesar 38,6%, angka ini jauh menurun dari tahun 2019 yaitu 72,1%. Untuk angka pengobatan lengkap (*complete rate*) semua kasus tuberkulosis di Kota Probolinggo pada tahun 2020 adalah sebesar 41,6%, juga menurun dibandingkan tahun 2019 yang angka pengobatan lengkap (*complete rate*) nya sebesar 58,3%.

Angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) semua kasus TBC adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB. Pada tahun 2020 di Kota Probolinggo angka keberhasilan pengobatan semua kasus TBC adalah 54,1% menurun apabila dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 76,8%. Menurut Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 angka keberhasilan pengobatan TBC minimal 90% sehingga Kota Probolinggo masih jauh dibawah target yang

ditetapkan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan angka keberhasilan pengobatan TBC.

Jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis menggambarkan kasus TB yang meninggal atas sebab apapun selama pengobatan TB. Pada Tahun 2020 jumlah ini mencapai 4,5 per 100.000 penduduk.

Gambar 2.15. Jumlah Kematian selama pengobatan tuberkolosis di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020



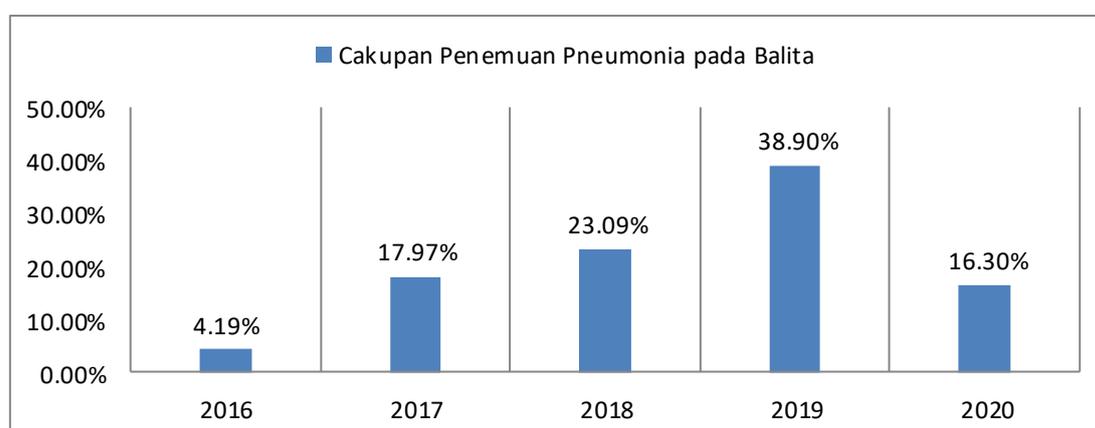
Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah kematian selama pengobatan TB pada Tahun 2020 menjadi 4,5 per 100.000 penduduk. Meskipun terjadi penurunan pada jumlah kematian selama pengobatan TB namun Angka Kesembuhan tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis dan Angka pengobatan lengkap (*complete rate*) semua kasus tuberkulosis di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 masih rendah. Sehingga tetap diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan capaian ini beserta CNR dan CDR.

- Pneunomia

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Kota Probolinggo pada Tahun 2016-2020.

Gambar 2.16. Cakupan Penemuan Kasus Pneumonia Balita di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

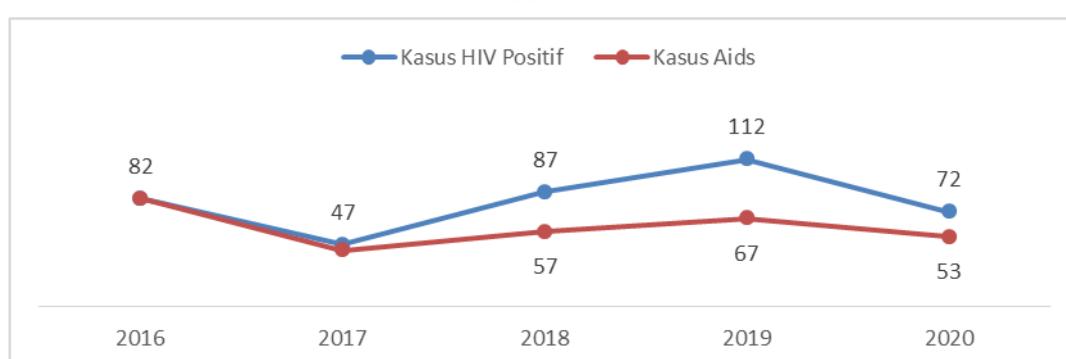


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Cakupan penemuan kasus pneumonia balita di Kota Probolinggo selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan namun pada Tahun 2020 cakupan ini menurun cukup signifikan, dikarenakan selama masa pandemi pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan secara normal dengan adanya pembatasan pelayanan tatap muka di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

- HIV dan AIDS

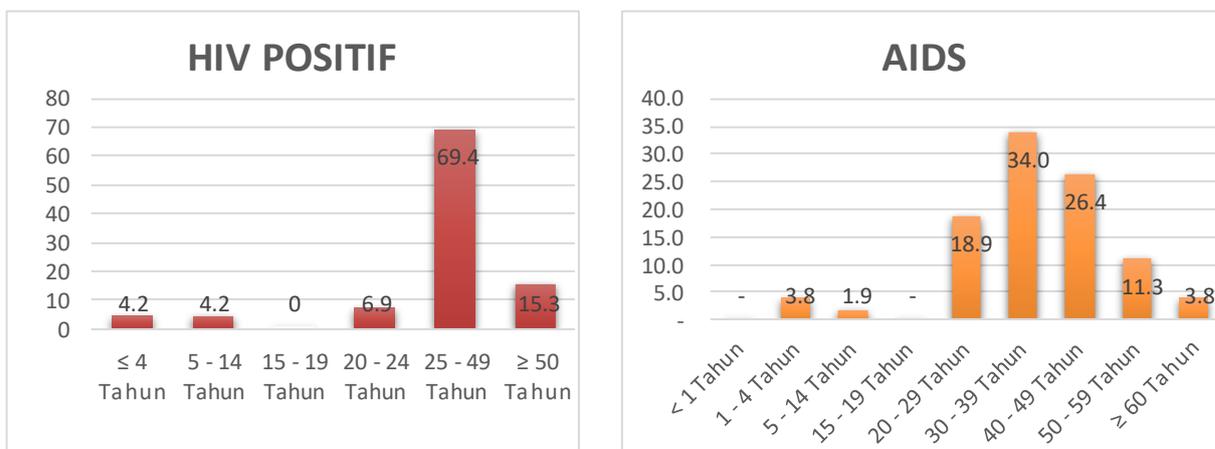
Gambar 2.17. Jumlah Kasus HIV Positif dan AIDS yang dilaporkan di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat jumlah kasus HIV dan AIDS di Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif namun menunjukkan tren menurun pada tahun 2020. Sedangkan persentase menurut umur Kasus HIV Positif dan AIDS di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 sebagai berikut.

Gambar 2.18. Persentase Kasus HIV Positif dan AIDS menurut kelompok umur di Kota Probolinggo Tahun 2020

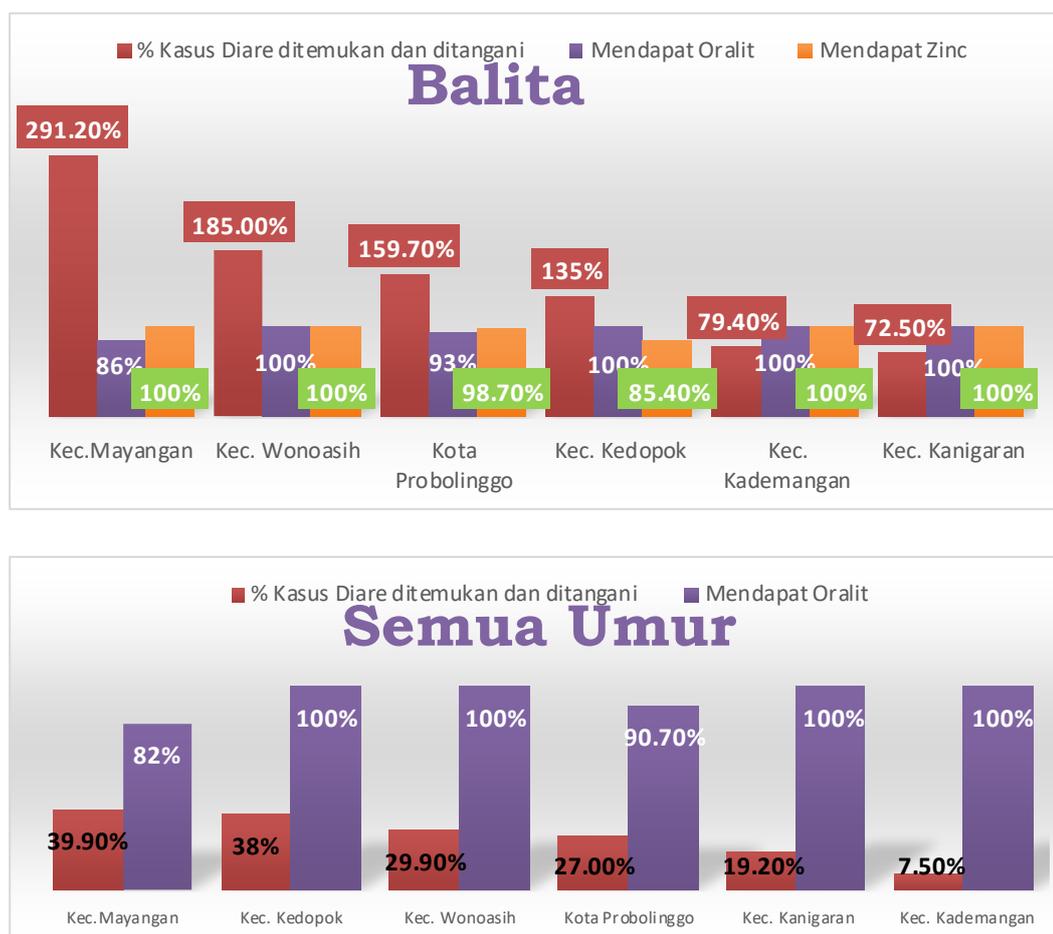


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

- Diare

Penyakit diare masih merupakan masalah Kesehatan masyarakat bagi negara berkembang seperti di Indonesia, selain itu diare juga dapat menjadi salah satu penyebab kematian pada balita.

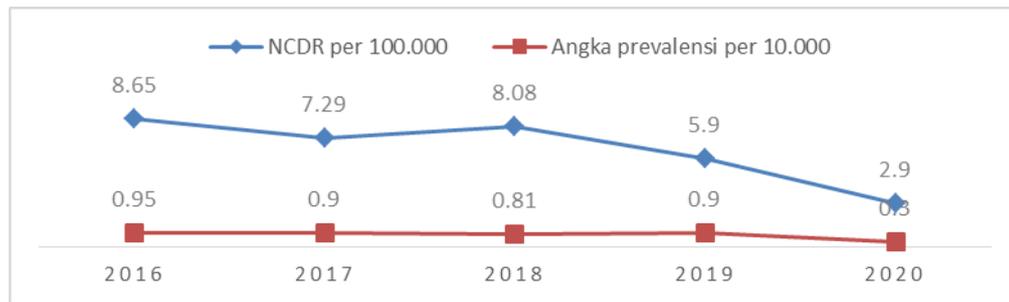
Gambar 2.19. Kasus diare pada balita dan semua kelompok umur di Kota Probolinggo Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

- Kusta

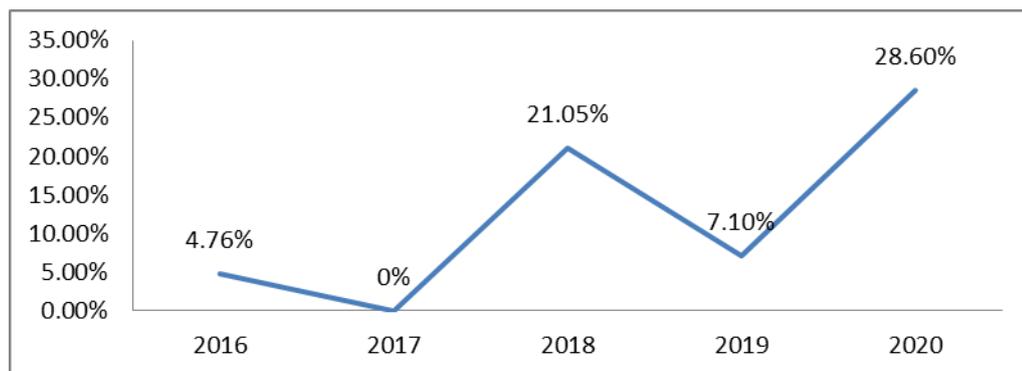
Gambar 2.20. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (*New Case Detection Rate/NCDR*) Kota Probolinggo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Selama 5 tahun terakhir Kota Probolinggo telah mencapai status eliminasi kusta (prevalensi kusta <1 per 10.000 penduduk) dengan angka prevalensi sebesar 0,3 pada Tahun 2020. Pada angka penemuan kasus baru kusta juga trennya selama 5 tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2020 dilaporkan kasus baru kusta sebanyak 7 kasus, lebih rendah dari Tahun 2019 sebanyak 14 kasus dengan angka penemuan kasus baru sebesar 2,9 per 100.000 penduduk.

Gambar 2.21. Persentase kasus baru kusta anak usia 0-14 tahun di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

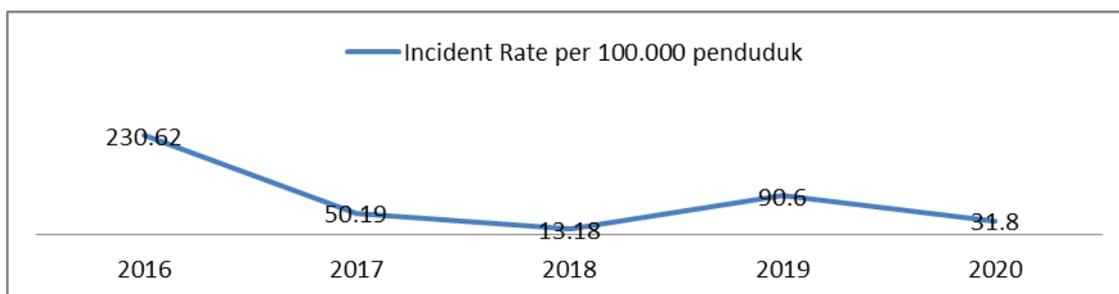


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Kasus baru kusta pada anak 0-14 Tahun di Kota Probolinggo Tahun 2020 mencatatkan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Masih adanya kasus Kusta pada anak harus menjadi perhatian lebih dikarenakan aktifitas anak dalam sekolah yang menimbulkan resiko penularan pada lingkungannya.

- Demam Berdarah Dengue (DBD)

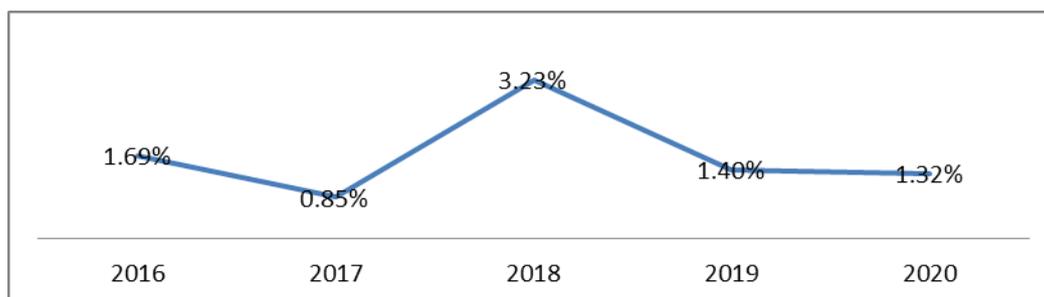
Gambar 2.22. Angka Kesakitan DBD Kota Probolinggo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Angka kesakitan DBD di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 adalah 31,8 per 100.000 penduduk menurun dibandingkan angka pada Tahun 2019, yaitu 90,6 per 100.000 penduduk.

Gambar 2.23. Angka Kematian DBD (CFR) Kota Probolinggo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Angka Kematian akibat DBD di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun angka kematian ini lebih tinggi dari angka di Jawa Timur pada Tahun 2020 yaitu 0,9%.

- Malaria

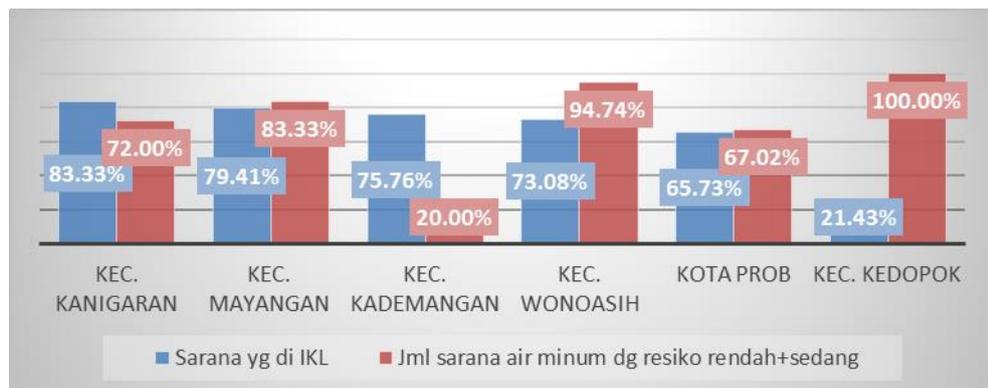
Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 tidak ditemukan kasus malaria di Kota Probolinggo namun pada Tahun 2019 ada 2 kasus sehingga angka kesakitan malaria 0,008 per 1.000 penduduk pada Tahun 2020 ditemukan 1 kasus sehingga angka kesakitannya menjadi 0,004 per 1.000 penduduk. Suspek malaria pada Tahun 2020 di Kota Probolinggo sebanyak 1 orang yang selanjutnya dikonfirmasi menjadi kasus melalui konfirmasi laboratorium dengan metode RDT. Sedangkan Persentase pengobatan standar kasus malaria positif di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 adalah 100%.

c. Upaya Penyehatan Lingkungan

- Akses Air Minum

Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL. Pelaksanaan IKL dilakukan oleh tenaga sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan, atau kader lain di kelurahan yang telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas sarana air minum. Berikut ini sarana air minum yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Kota Probolinggo tahun 2020 :

Gambar 2.24. Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Kota Probolinggo pada Tahun 2020

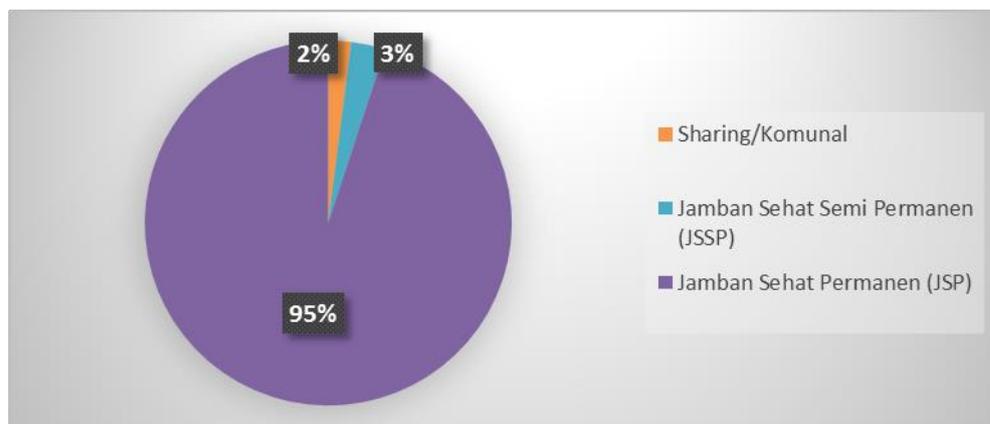


Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Pada Tahun 2020, dari 143 sarana air minum yang ada di Kota Probolinggo dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap 94 sarana air minum saja atau sekitar 65,73% dari total sarana air minum yang ada. Dari 94 sarana air minum tersebut sebanyak 63 sarana memiliki Resiko Rendah dan Sedang atau sekitar 67,02%. Dari IKL di 5 Kecamatan tersebut, didapat Kecamatan Kedopok yang sarana air minum dengan Resiko Rendah dan Sedang mencapai 100%, sedangkan Kecamatan Kademangan mempunyai sarana air minum dengan Resiko Rendah dan Sedang paling kecil yakni 20%.

- Akses Sanitasi Layak

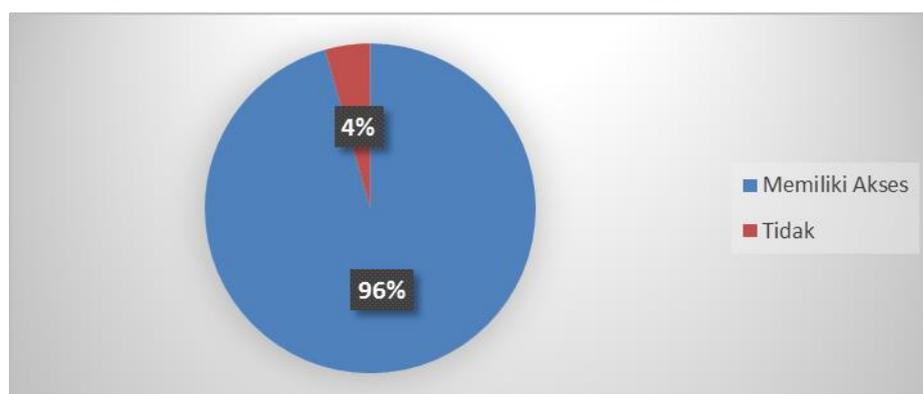
Gambar 2.25. Proporsi Penggunaan Jenis Jamban Sehat di Kota Probolinggo Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Pada Tahun 2020 sebanyak 95% keluarga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) menggunakan jamban sehat permanen. Hanya 2% keluarga yang menggunakan jamban secara *sharing/komunal*.

Gambar 2.26. Keluarga dengan Akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (Jamban Sehat) Kota Probolinggo Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2021

Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban sehat) di Kota Probolinggo pada Tahun 2020 sudah mencapai angka 96%.

2.1.2 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara termasuk bagi anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Komitmen global terhadap pendidikan anak usia dini tercermin dalam adagium masyarakat pendidikan dunia melalui komitmen pendidikan untuk semua (*Education for All*) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Bagi Indonesia, semangat global ini diimplementasikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan secara tegas, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan akan dimulai sejak dini, bukan lagi setelah berusia sekolah. Lebih lanjut disebutkan dalam UU tersebut (Bab I, pasal 1 butir 14) bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Seluruh aspek tumbuh kembang anak dapat berkembang pesat apabila memperoleh stimulasi yang baik. Salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan intervensi dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

PAUD dapat meningkatkan kesiapan sekolah anak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan penyediaan layanan pendidikan anak usia dini, akan memberikan stimulasi positif untuk mendorong perkembangan seluruh aspek tumbuh kembang anak sebagai mana telah diatur dalam Standart Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA).

Pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal dan sesuai dengan potensi-potensi uniknya bagi setiap anak, merupakan bagian penting dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter bangsa Indonesia, dengan sifat-sifat utama berakhlak mulia, menghargai keberagaman dan bersikap toleran. Tolak ukur keberhasilan penyediaan layanan pendidikan anak usia dini bukan hanya dilihat dari ketersediaan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini, melainkan juga partisipasi anak usia dini yang mengikuti proses pendidikan. Dalam konteks ini Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi salah satu alat ukur dalam menilai pelaksanaan pendidikan anak usia dini. APK Pendidikan Anak Usia Dini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mengakses PAUD, artinya indikator ini juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini.

a. Akses dan Partisipasi ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 2.3. Perkembangan Jumlah Anak Umur 1-6 Tahun terlayani PAUD per Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mayangan	2.750	2.747	2.740	2.733	2.504
2	Kademangan	1.522	1.510	1.424	1.319	1.191
3	Wonoasih	860	845	856	825	824
4	Kanigaran	1.812	1.750	1.811	1.703	1.647
5	Kedopok	1.500	1.460	1.399	1.361	1.397
JUMLAH		8.444	8.312	8.230	7.941	7.563

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kota Probolinggo pada tahun 2020 adalah 85,75. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 87,97 pada tahun 2019. Berbagai upaya telah dilakukan agar meningkatkan angka partisipasi PAUD Kota Probolinggo, salah satunya dengan memfasilitasi lembaga PAUD di tiap-tiap kelurahan. Berikut ini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Probolinggo :

Tabel 2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Probolinggo

NO	TAHUN	APK PAUD
1	2015	82,17
2	2016	80,21
3	2017	94,28
4	2018	94,28
5	2019	87,97
6	2020	85,75

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2021

b. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD yang berkualitas dan bermutu tidak terlepas dari guru yang berkualitas. Untuk itu, sangat diperlukan guru yang berkualitas dan terlatih dengan jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jumlah guru PAUD berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5. Jumlah Guru PAUD berdasarkan kualifikasi Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Kualifikasi	Kecamatan				
			Mayangan	Kademangan	Wonoasih	Kanigaran	Kedopo
1	2016	< D4/S1	33	33	36	44	40
		≥ D4/S1	54	14	5	30	20
2	2017	< D4/S1	39	32	29	45	36
		≥ D4/S1	55	18	10	30	24
3	2018	< D4/S1	45	32	27	40	38
		≥ D4/S1	54	17	12	30	24
4	2019	< D4/S1	39	31	27	44	37
		≥ D4/S1	55	15	17	29	27
5	2020	< D4/S1	41	32	27	42	38
		≥ D4/S1	51	15	15	27	27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2021

Salah satu indikator mutu PAUD dapat diukur dengan penetapan standar dan akreditasi sekolah. Berikut ini peringkat akreditasi PAUD di Kota Probolinggo :

Tabel 2.6. Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi

Tahun	KB				Σ	TPA				Σ	TK/RA				Σ
	A	B	C	TT		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
2016	1	-	-	107	108	-	-	-	13	13	-	3	-	131	134
2017		7	-	101	108	-	-	-	13	13	4	16	1	113	134
2018	-	2	1	102	105	-	-	-	13	13	5	4	1	126	136
2019	-	7	-	96	103	-	2	-	11	13	21	12	2	103	138
2020	-	-	-	103	103	-	2	-	10	12	-	4	-	137	141

Ket :

TT : Tidak Tahu

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2021

Kota Probolinggo perlu meningkatkan akses dan kualitas PAUD yakni melalui peningkatan akses layanan PAUD bagi masyarakat miskin, peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik, guru pendamping dan pengasuh PAUD, membangun jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan dan menggalang dukungan berbagai pihak termasuk pihak swasta dalam penyediaan layanan PAUD HI.

Sedangkan data lembaga-lembaga PAUD yang telah ditetapkan menjadi PAUD HI adalah sebanyak 29 (dua puluh) yakni 1 (satu) di tiap kelurahan. Lembaga PAUD HI tersebut sebagai berikut :

- Kecamatan Mayangan
 - a. Kelurahan Sukabumi : KB & TK Tunas Harapan
 - b. Kelurahan Mangunharjo : KB & TK Al Alim
 - c. Kelurahan Jati : KB & TK Kuncup Harapan
 - d. Kelurahan Wiroborang : TK Negeri Pembina
 - e. Kelurahan Mayangan : KB & TK Melati 2
- Kecamatan Kademangan
 - a. Kelurahan Kademangan : KB & TK Harapan Bangsa
 - b. Kelurahan Ketapang : KB & TK Mega Ceria
 - c. Kelurahan Triwung Kidul : KB & TK Bunga Bangsa
 - d. Kelurahan Pilang : TK Al Ikhlas
 - e. Kelurahan Triwung Lor : KB Wijaya Kusuma 2
 - f. Kelurahan Pohsangit Kidul: KB Dahlia
- Kecamatan Wonoasih
 - a. Kelurahan Jrebeng Kidul : TK Budi Utomo
 - b. Kelurahan Kedungasem : KB & TK Kartini II
 - c. Kelurahan Sumber Taman : TPAIT, KB, TKIT Bintangku
 - d. Kelurahan Wonoasih : KB Chandra Kirana
 - e. Kelurahan Kedunggaleng : TK Dharma Bhakti
 - f. Kelurahan Pakistaji : TK Riyadlus Sholihin
- Kecamatan Kanigaran
 - a. Kelurahan Kanigaran : TPA, KB, TK Bintang
 - b. Kelurahan Kebonsari Kulon: KB & TK Sri Kusuma
 - c. Kelurahan Tisnonegaran : KB & TK Taman Indria I
 - d. Kelurahan Sukoharjo : KB & TK Taman Indria II
 - e. Kelurahan Kebonsari Wetan: TK Harapan Kita
 - f. Kelurahan Curahgrinting : TK Hudaya
- Kecamatan Kedopok
 - a. Kelurahan Jrebeng Wetan : KB & TK Permata Hati
 - b. Kelurahan Jrebeng Lor : KB & TK Delima
 - c. Kelurahan Kareng Lor : TPA, KB, TK Ceria
 - d. Kelurahan Sumber Wetan : KB & TK Bayuangga 1
 - e. Kelurahan Jrebeng Kulon : TK Pelangi
 - f. Kelurahan Kedopok : TK Sinar Harapan

2.1.3 Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak

Perlindungan dan pengasuhan anak merupakan bagian dari proses sosialisasi yang paling penting dan mendasar, karena fungsi perlindungan dan pengasuhan adalah untuk mempersiapkan anak menjadi warga negara yang baik. Praktik-praktik pola pengasuhan anak sangat erat kaitannya dengan kepribadian sang anak setelah dewasa.

Mengasuh anak adalah sebuah tugas yang menantang bagi orang tua. Pengasuhan (*Parenting*) memerlukan sejumlah kemampuan interpersonal dan mempunyai tuntutan emosional yang besar. Namun sangat sedikit pendidikan formal mengenai tugas ini. Kebanyakan orang tua mempelajari praktek pengasuhan dari orang tua mereka sendiri. Sayangnya ketika metode orang tua diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, praktik yang baik dan kurang baik tetap dipergunakan. Meskipun pola pengasuhannya berbeda, orang tua harus tahu bahwa sikap dan perilaku yang ditampilkan orang tua tidak lepas dari perhatian dan pengamatan anak, karena pada masa perkembangannya anak selalu ingin mengikuti apa yang orang tua lakukan.

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang terdiri dari nama, orang tua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahkan di Kota Probolinggo sendiri, hal tersebut telah dipertegas dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak, yang mana dalam pemberian kutipan akta kelahiran anak di Kota Probolinggo sudah dibebaskan dari biaya pungutan atau gratis.

Akta kelahiran adalah sebuah akta yang dikeluarkan negara melalui pejabat yang berwenang yang berisi identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu bukti kewarganegaraan seseorang. Terdapat 2 (dua) fungsi utama dari Akta kelahiran yaitu :

- 1) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hukum; dan
- 2) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.

Dengan adanya akta kelahiran ini, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial. Berikut ini data terkait kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA di Kota Probolinggo :

Tabel 2.7. Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Layanan Akta Kelahiran	orang	4,347	4,688	4,896	5,659	4,744
Jumlah Penduduk Usia <17 tahun	orang	62.201	63.321	62.239	66.390	64.945
Jumlah Kepemilikan KIA	Orang	16	31.043	38.270	45.512	52.444
Prosentase Kepemilikan KIA	%	0.03	49.02	61	68.55	80.75

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, 2021

Sedangkan jumlah penduduk usia dini yang ada di Kota Probolinggo berdasarkan umur, jenis kelamin dan kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. Penduduk Kota Probolinggo berdasarkan umur, jenis kelamin dan kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2020

Kelompok Umur	KEC. KADEMANGAN			KECAMATAN WONOASIH			KECAMATAN MAYANGAN			KECAMATAN KANIGARAN			KECAMATAN KEDOPOK			KOTA PROOBOLINGGO		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
0	276	291	567	236	224	460	326	315	641	388	338	726	271	254	525	1497	1422	2919
1	325	337	662	291	289	580	385	429	814	460	499	959	314	345	659	1775	1899	3674
2	382	376	758	322	305	627	528	473	1001	511	510	1021	339	301	640	2082	1965	4047
3	399	336	735	293	265	558	438	458	896	496	500	996	331	325	656	1957	1884	3841
4	344	295	639	262	253	515	474	423	897	466	430	896	277	271	548	1823	1672	3495
5	339	324	663	278	293	571	505	453	958	498	468	966	292	317	609	1912	1855	3767
6	390	311	701	270	278	548	486	458	944	501	489	990	328	305	633	1975	1841	3816
7 - 9	1165	1034	2199	885	830	1715	1603	1510	3113	1651	1542	3193	992	962	1954	6296	5878	12174
10 - 14	1829	1750	3579	1444	1396	2840	2711	2589	5300	2657	2611	5268	1553	1444	2997	10194	9790	19984
15 - 17	5020	5054	10074	4296	4121	8417	7385	6886	14271	7154	6865	14019	4308	4385	8693	28163	27311	55474
18 - 19	3509	3497	7006	2980	2845	5825	5111	4728	9839	4935	4671	9606	2910	2971	5881	19445	18712	38157
20 - 24	1820	1792	3612	1577	1468	3045	2688	2454	5142	2560	2363	4923	1438	1491	2929	10083	9568	19651
25 - 29	1689	1705	3394	1403	1377	2780	2423	2274	4697	2375	2308	4683	1472	1480	2952	9362	9144	18506
30 - 34	1511	1557	3068	1316	1276	2592	2274	2158	4432	2219	2194	4413	1398	1414	2812	8718	8599	17317
35 - 39	1733	1837	3570	1384	1419	2803	2552	2571	5123	2472	2587	5059	1540	1575	3115	9681	9989	19670
40 - 44	1628	1691	3319	1305	1275	2580	2497	2508	5005	2329	2333	4662	1392	1471	2863	9151	9278	18429
45 - 49	1577	1584	3161	1234	1350	2584	2245	2331	4576	2184	2280	4464	1332	1347	2679	8572	8892	17464
50 - 54	1427	1510	2937	1185	1261	2446	2108	2208	4316	2005	2195	4200	1176	1135	2311	7901	8309	16210
55 - 60	1300	1503	2803	1148	1101	2249	1855	2334	4189	1760	2125	3885	1078	1059	2137	7141	8122	15263

Kelompok Umur	KEC. KADEMANGAN			KECAMATAN WONOASIH			KECAMATAN MAYANGAN			KECAMATAN KANIGARAN			KECAMATAN KEDOPOK			KOTA PROOBOLINGGO		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
> 60	1868	2151	4019	1479	1595	3074	2908	3556	6464	2403	3013	5416	1465	1686	3151	10123	12001	22124
JUMLAH	21848	22109	43957	17759	17672	35431	31784	32046	63830	30576	31272	61848	18582	18598	37180	120549	121697	242246

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, 2021.

Tabel 2.9. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 1-18 Tahun Kota Probolinggo Tahun 2020

Kelurahan	Σ Penduduk Usia di bawah 18 tahun			Σ Kepemilikan Akta Penduduk di bawah 18 tahun			Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran			%		
	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ
	L	P		L	P		L	P		L	P	
KETAPANG	1,233	1,124	2,357	1,156	1,047	2,203	77	77	154	93.76%	93.15%	93.47%
TRIWUNG LOR	1,143	1,070	2,213	1,071	1,007	2,078	72	63	135	93.70%	94.11%	93.90%
TRIWUNG KIDUL	1,359	1,269	2,628	1,283	1,218	2,501	76	51	127	94.41%	95.98%	95.17%
POHSANGIT KIDUL	817	729	1,546	783	706	1,489	34	23	57	95.84%	96.84%	96.31%
KADEMANGAN	1,294	1,202	2,496	1,223	1,151	2,374	71	51	122	94.51%	95.76%	95.11%
PILANG	1,093	984	2,077	1,042	936	1,978	51	48	99	95.33%	95.12%	95.23%
KEC. KADEMANGAN	6,939	6,378	13,317	6,558	6,065	12,623	381	313	694	94.51%	95.09%	94.79%
JREBENG KIDUL	850	742	1,592	814	719	1,533	36	23	59	95.76%	96.90%	96.29%
PAKISTAJI	801	772	1,573	757	739	1,496	44	33	77	94.51%	95.73%	95.10%
KEDUNG GALENG	442	399	841	423	386	809	19	13	32	95.70%	96.74%	96.20%
KEDUNG ASEM	1,175	1,132	2,307	1,126	1,086	2,212	49	46	95	95.83%	95.94%	95.88%
SUMBER TAMAN	1,557	1,578	3,135	1,473	1,503	2,976	84	75	159	94.61%	95.25%	94.93%
WONOASIH	621	621	1,242	607	601	1,208	14	20	34	97.75%	96.78%	97.26%
KEC. WONOASIH	5,446	5,244	10,690	5,200	5,034	10,234	246	210	456	95.48%	96.00%	95.73%

Kelurahan	Σ Penduduk Usia di bawah 18 tahun			Σ Kepemilikan Akta Penduduk di bawah 18 tahun			Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran			%		
	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ
	L	P		L	P		L	P		L	P	
MAYANGAN	1,878	1,761	3,639	1,715	1,628	3,343	163	133	296	91.32%	92.45%	91.87%
MANGUNHARJO	3,145	2,938	6,083	2,739	2,568	5,307	406	370	776	87.09%	87.41%	87.24%
JATI	1,964	1,909	3,873	1,796	1,759	3,555	168	150	318	91.45%	92.14%	91.79%
SUKABUMI	1,605	1,477	3,082	1,462	1,365	2,827	143	112	255	91.09%	92.42%	91.73%
WIROBORANG	1,098	1,060	2,158	1,017	981	1,998	81	79	160	92.62%	92.55%	92.59%
KEC. MAYANGAN	9,690	9,145	18,835	8,729	8,301	17,030	961	844	1,805	90.08%	90.77%	90.42%
TISNONEGARAN	999	966	1,965	939	925	1,864	60	41	101	93.99%	95.76%	94.86%
SUKOHARJO	1,138	1,111	2,249	1,079	1,058	2,137	59	53	112	94.82%	95.23%	95.02%
KANIGARAN	3,250	3,125	6,375	3,113	2,984	6,097	137	141	278	95.78%	95.49%	95.64%
KEBONSARI WETAN	1,001	991	1,992	973	964	1,937	28	27	55	97.20%	97.28%	97.24%
CURAHGRINTING	904	855	1,759	871	819	1,690	33	36	69	96.35%	95.79%	96.08%
KEBONSARI KULON	2,399	2,276	4,675	2,302	2,172	4,474	97	104	201	95.96%	95.43%	95.70%
KEC. KANIGARAN	9,691	9,324	19,015	9,277	8,922	18,199	414	402	816	95.73%	95.69%	95.71%
JREBENG KULON	943	854	1,797	893	826	1,719	50	28	78	94.70%	96.72%	95.66%
KARENG LOR	876	870	1,746	830	824	1,654	46	46	92	94.75%	94.71%	94.73%

Kelurahan	Σ Penduduk Usia di bawah 18 tahun			Σ Kepemilikan Akta Penduduk di bawah 18 tahun			Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran			%		
	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ
	L	P		L	P		L	P		L	P	
SUMBER WETAN	1,042	1,032	2,074	963	956	1,919	79	76	155	92.42%	92.64%	92.53%
JREBENG LOR	1,629	1,456	3,085	1,512	1,371	2,883	117	85	202	92.82%	94.16%	93.45%
KEDOPOK	679	647	1,326	634	600	1,234	45	47	92	93.37%	92.74%	93.06%
JREBENG WETAN	770	718	1,488	704	663	1,367	66	55	121	91.43%	92.34%	91.87%
KEC. KEDOPOK	5,939	5,577	11,516	5,536	5,240	10,776	403	337	740	93.21%	93.96%	93.57%
JUMLAH KOTA PROBOLINGGO	37,705	35,668	73,373	35,300	33,562	68,862	2,405	2,106	4,511	93.62%	94.10%	93.85%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, 2021.

Kesadaran masyarakat Kota Probolinggo sebenarnya sudah tinggi terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan, terutama dalam hal kepemilikan akta kelahiran. Namun upaya tetap dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran, seperti memberikan sosialisasi secara bertahap dan menyeluruh di setiap wilayah Kota Probolinggo, baik secara langsung maupun melalui media informasi seperti radio, surat kabar, baliho atau pamflet.

Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo mempunyai program yang memudahkan pelayanan akta kelahiran bagi masyarakat yakni Akik Cemerlang (Bagi Anak Tersayang, Awal Masa Depan Gemilang). Akik Cemerlang merupakan penggabungan layanan di dua bidang yang terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sehingga 3 (tiga) produk administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Akta Kelahiran) tidak di urus satu persatu, tapi cukup 1 (satu) kali urus 3 (tiga) produk administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Akta Kelahiran) sehari langsung jadi. Ketiga dokumen tersebut merupakan bukti kehadiran Negara dalam Kehidupan Warga Negeranya, guna memberikan identitas yang tunggal, wujud perlindungan dan pelayanan. Serta sebagai langkah awal orang tua dalam menghantarkan buah hatinya menuju masa depan yang gemilang karena akan dibutuhkan sebagai syarat administrasi pelayanan publik, persyaratan mendaftar lomba, persyaratan sekolah, persyaratan pendaftaran pekerjaan dan kebutuhan lainnya.

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak pasal 9 menyatakan bahwa tiap anak berhak tinggal bersama orangtua mereka kecuali jika hal itu justru merugikan sang anak sebagai contoh jika anak mendapatkan perlakuan tidak baik atau diabaikan oleh salah satu orangtua dan tiap anak berhak tetap berhubungan dengan orangtuanya apabila ia tinggal terpisah dari salah satu atau kedua orangtuanya. Hal ini dimaksudkan bahwa keluarga adalah tempat terbaik bagi tumbuh kembang anak yang optimal. Anak-anak yang berada di institusi/panti sejak dini dan dalam waktu yang panjang tidak mendapatkan rangsangan perkembangan dan pemenuhan kebutuhan akan kelekatan (*attachment*) akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial anak di masa depan (*SaveThe Children*, Depsos RI dan Unicef, 2007 : 21)

Dalam rangka untuk mendapatkan anak yang sehat dan cerdas sesuai dengan pertumbuhan mereka, anak-anak perlu dipenuhi haknya baik untuk fisik, psikologis, kebutuhan sosial dan spiritual. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak memerlukan peran orang dewasa baik itu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan makan, perawatan, pendidikan, bimbingan, perasaan aman dan pencegahan penyakit. Namun pada kenyataannya tidak semua orangtua dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mereka merasa perlu mengalihkan tanggung jawab tersebut pada orang lain atau lembaga sosial, seperti orangtua asuh atau panti asuhan.

Pada wilayah Kota Probolinggo sudah terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang bertugas menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak di luar lingkungan keluarga, seperti panti asuhan anak yang berada di bawah binaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sementara itu untuk rumah singgah di Kota Probolinggo saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Berikut merupakan kondisi fasilitas layanan yang dilakukan oleh LKSA :

Tabel 2.10. Jumlah LKSA di Kota Probolinggo Tahun 2020

NO	KEC	NAMA LKSA	JUMLAH ANAK PANTI			KETERANGAN		ALAMAT
			L	P	Total	ANAK ASUH DALAM PANTI	ANAK ASUH LUAR PANTI	
1	KANIGARAN	LKSA PUTRI MUHAMMADIYAH	-	32	32	29	3	JL. Ir. JUANDA 57H TISNONEGARAN PROBOLINGGO / Telp (0335) 421500
2	KANIGARAN	LKSA AN NAJAH	16	19	35	6	29	JL. Supriyadi Gg 1 No 19 A, Tisnonegaran, Probolinggo
3	MAYANGAN	LKSA NAHDLATUL ULAMA	51	44	95	45	50	JL. KH HASYIM ASHARI 27 PROBOLINGGO / Telp (0335) 422067
4	MAYANGAN	LKSA SINT YAN	33	-	33	33	-	JL. SUROYO 38 SUKABUMI PROBOLINGGO / Telp (0335) 421794
5	MAYANGAN	LKSA SANTO YOSEPH	-	61	61	61	-	Dr. MOCH SALEH 27 SUKABUMI PROBOLINGGO / Telp (0335) 421591
6	MAYANGAN	LKSA PUTRA MUHAMMADIYAH	23	-	23	23	-	JL. SOEKARNO HATTA 94B SUKABUMI PROBOLINGGO / Telp (0335) 429277
7	MAYANGAN	LKSA ASIH ASUH	22	31	33	5	28	JL. SERMA ABD RAHMAN 30B PROBOLINGGO / Telp (0335) 426383
8	KADEMANGAN	LKSA AZIDAN	4	16	20	20	-	Jl KH Fadhol no 44, Kademangan, Kota Probolinggo
9	KADEMANGAN	LKSA RIYADLUSH SHOLIHIN	45	55	100	100	-	JL. LAWU 39 KETAPANG PROBOLINGGO / Telp (0335) 423045
10	KADEMANGAN	LKSA BADRUTAMMAM ASSULTHON	15	8	23	23	-	JL. KH. SHULTHON 1 TRIWUNG KIDUL KADEMANAGAN PROBOLINGGO / Telp (0335) 432646
11	KEDOPOK	LKSA AL IHSAN	20	1	21	21	-	PORONG 11 SUMBER WETAN KEDOPOK PROBOLINGGO / Telp (0335) 423287 / 7606000
12	KEDOPOK	PANTI ASUHAN AL UMAH	16	31	47	17	30	JL PROF Dr HAMKA RT 01 RW 03, KEL KARENGLOR, KEC. KEDOPOK, KOTA PROBOLINGGO

13	WONOASIH	LKSA ULIL ALBAB NUSANTARA	35	60	95	3	92	JI SUNAN GIRI 53, 007/001, SUMBERTAMAN, WONOASIH, KOTA PROBOLINGGO
----	----------	------------------------------	----	----	----	---	----	---

Sumber : Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2021

Mekanisme pelaporan dan pencatatan rutin terkait anak yang membutuhkan pelayanan untuk perlindungan khusus (AMPK) sampai saat ini belum dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.11. Data Korban Kekerasan Anak Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

		JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
Bentuk kekerasan	Fisik	11	4	10	2	11
	Psikis	10	0	0	0	17
	Seksual	2	3	3	8	8
	Eksplorasi	0	0	0	0	0
	Trafficking	0	0	0	0	0
	Penelantaran	0	0	6	0	2
	Lainnya	0	1	0	3	0
Tempat kejadian	Rumah Tangga	11	39	20	12	28
	Tempat kerja	0	0	0	0	0
	Lainnya	5	0	2	2	3
	Sekolah	1	0	1	4	1
	Fasilitas Umum	5	2	0	6	13
	Lembaga pendidikan kilat	0	0	0	0	0
Jenis Pelayanan	Pengaduan	0	3	13	12	0
	Kesehatan	0	1	4	1	0
	Bantuan Hukum	0	1	1	2	0
	Penegakan Hukum	0	1	2	3	0
	Rehabilitasi Sosial	0	0	2	0	0
	Reintegrasi Sosial	0	0	0	0	0
	Pemulangan	0	0	1	0	0
	Pendampingan Tokoh Agama	0	0	0	0	0
Jumlah Kasus		22	41	32	24	45

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2021

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 jumlah kekerasan terhadap anak meningkat hampir 50 (lima puluh) persen yakni dari 24 kasus menjadi 45 kasus. Kasus-kasus ini sebagian besar dilakukan di rumah yang sebagian besar pelaku kekerasannya merupakan orang terdekat korban, seperti orang tua, saudara, tetangga dan lain-lain.

Sedangkan data anak-anak penyandang masalah sosial di Kota Probolinggo Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.12. Data Masalah Sosial Anak Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Data Masalah Sosial Anak						Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/ Diperlakukan
		Anak Terlantar	Balita terlantar	Anak Berhadapan dengan Hukum	Anak Jalanan	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus		
1	Mayangan	-	-	-	-	-	-	
2	Kedopok	-	-	-	-	-	-	
3	Wonoasih	-	-	-	-	-	-	
4	Kademangan	-	1	-	-	-	-	
5	Kanigaran	5	-	-	-	-	-	
Kota Probolinggo		5	1		-	-	-	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2021

2.2 Analisis Situasi Kelembagaan

Jumlah PAUD di Kota Probolinggo dari tahun ke tahun mengalami tren yang meningkat. Dengan adanya jumlah lembaga PAUD ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses PAUD. Berikut data jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.13. Data Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

Tahun	LEMBAGA PAUD											
	KB			TPA			TK/RA			SPS (Satuan PAUD Sejenis)		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	108	108	-	13	13	1	133	134	-	-	-
2018	-	105	105	-	13	13	1	135	136	-	-	-

2019	-	103	103	-	13	13	1	137	138	-	-	-
2020	-	103	103	-	12	12	1	140	141	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2021

Tabel 2.14. Perkembangan Situasi Kelembagaan PAUD HI Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kader BKB	0	0	340	340	340
Jumlah Kader Posyandu	136	136	136	136	136
Jumlah Kader PKH	30	30	30	30	30
Jumlah Bunda PAUD	35	35	35	35	35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Probolinggo, 2021.

BAB III

TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN INDIKTOR CAPAIAN

3.1 Tujuan Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pembangunan dalam jangka waktu perencanaan.

Adapun Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi.

Upaya mewujudkan pencapaian visi misi PAUD HI Kota Probolinggo meliputi 3 (tiga) tujuan dasar PAUD HI berikut ini, yang disesuaikan dengan dokumen Stranas PAUD HI (Bappenas, 2008):

1. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh (kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengasuhan sesuai segmentasi umur);
2. terlindunginya anak dari perlakuan salah, pada tataran keluarga maupun lingkungan; dan
3. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi.

3.2 Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013, arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik integratif melalui :

- a. peningkatan akses, pemerataan, dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal nasional maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;

Sedangkan sarannya melingkupi :

1. peningkatan derajat kesehatan dan gizi ibu dan anak usia dini;
2. meningkatnya kesiapan anak untuk bersekolah;
3. meningkatnya anak berakhlak mulia;
4. meningkatnya kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan;
5. meningkatnya internalisasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan local;
6. meningkatnya akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini;
7. meningkatnya kemampuan ketenagaan pelayanan pengembangan anak usia dini;
8. meningkatnya pembiayaan untuk PAUD HI; dan
9. tersusunnya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada anak usia dini.

Untuk strategi PAUD HI meliputi :

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pranikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

3.3 Indikator Capaian

Dalam pengembangan indikator RAD PAUD HI Tahun 2022-2024, kerjasama lintas sektor dan pemastian terpenuhinya 5 (lima) layanan PAUD HI kepada anak usia dini di Kota Probolinggo menjadi hal penting yang harus diinternalisasikan pada indikator-indikator capaian selanjutnya. Oleh karena itu, dalam kerangka penyusunan indikator RAD PAUD HI Tahun 2022-2024 merujuk pada 4 (empat) tujuan khusus PAUD HI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI. Bidang layanan PAUD HI tercakup semuanya pada tujuan khusus tersebut, yang juga mempunyai target capaian masing-masing yang diatur pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Korelasi Target Capaian dengan Tujuan Khusus PAUD HI

No	Tujuan Khusus PAUD HI (Perpres RI Nomor 60 Tahun 2013)	Bidang Layanan PAUD HI	Target Capaian Bidang Layanan
1.	Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dinisecara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, Pembina moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kesehatan dan Gizi - Bidang Pendidikan - Bidang Pengasuhan dan Kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak usia dini hadir dan aktif ke lembaga layanan - Jumlah anak usia dini yang mendapat layanan kesehatan dan gizi - Akses anak usia dini mendapatkan pelayanan pemantauan tumbuh kembang dan simulasi perkembangan - Anak usia dini mendapatkan hak asuh dengan pola pengasuhan positif
2.	Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada	Bidang Perlindungan	Anak usia dini hidup sejahtera dan bebas dari kekerasan

3.	Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah	Bidang Tata Kelola	Tata kelola penyelenggaraan PAUD HI dari Tingkat Kota dan Kecamatan
4.	Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Bidang Tata Kelola	Komitmen melaksanakan PAUD HI dari berbagai unsur <i>stakeholder</i>

Pada setiap bidang yang diatur dalam pengelompokan indikator RAD PAUD HI Tahun 2022-2024 telah ditentukan juga indikator yang mencakup capaian dari pelaksanaan *output* berupa kegiatan-kegiatan dari setiap Perangkat Daerah :

Tabel 3.2 Indikator Output PAUD HI Indikator Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan
		Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pembinaan dan Manajemen PAUD	Jumlah pengurus HIMPAUDI Kota, Pengelola IGTKI, Guru PAUD/Guru TK Kota
			Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	Peserta Didik PAUD mendapatkan asupan gizi tambahan berupa penyediaan makanan sehat

2.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Kelompok Sasaran BKB yang mendapat promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak balita yang mendapatkan perawatan kesehatan - Jumlah Balita yg mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) - Jumlah Penurunan Angka Stunting pada anak usia dini - Jumlah Pengelola Program Kesga dinkes dan Tenaga Kesehatan Puskesmas - Jumlah Tenaga Puskesmas yg

				<p>terlatih pelayanan Kesehatan Balita terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
			<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase kunjungan neonatal pertama (KN1) - Presentase bayi lahir mendapat inisiasi menyusui Dini (IMD) - Jumlah bayi yang mendapatkan kunjungan Neonatus 1 dan Neonatus 2 - Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan kampanye ASI Eksklusif
			<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) - Presentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama

				<p>masa kehamilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif - Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat prioritas pencegahan Stunting - Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan penanganan Stunting - Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Usia 3-5 Tahun - Persentase Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk - Adanya Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita terintegrasi - Adanya Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita MTBS
			<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Persalinan di Faskes

			Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Kunjungan Nifas (KF1 dan KF4) selama Pasca Salin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Orang tua yang mengikuti Tes Prenatal - adanya ibu hamil yang diperiksa - Jumlah Kader Posyandu yg terlatih pemeriksaan ibu hamil - Prosentase Bumil yang mendapat pelayanan ANC (K4) - Prevalensi anemia pada ibu hamil - Jumlah ibu hamil yang diperiksa sesuai SPM - Jumlah Pengelola Program KIA dinkes dan Tenaga Kesehatan Puskesmas
			Pengelolaan Surveillance Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan Imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan - Jumlah balita mendapatkan Imunisasi lengkap - Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
--	--	--	--	--

Tabel 3.3 Indikator Output PAUD HI Indikator Pendidikan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah guru TK yang tersertifikasi. - Jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan berjenjang. - Jumlah Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD - Jumlah Guru yang mendapatkan Bimtek Pendidikan Karakter - Jumlah GPAI TK yang mengimplementa

				<p>sikan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di PAUD dan TK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah guru yang mendapatkan Bimtek Kompetensi untuk meningkatkan kualifikasi guru Taman Seminari - Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan mengenai perkembangan anak dan strategi untuk menstimulasinya
2.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Lomba lembaga (PAUD) Taman Seminari berkarakter - Jumlah anak yang memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar - Jumlah anak yang mendapatkan stimulasi perkembangan fisik, sosial, emosional dan bahasa

3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi. - Persentase Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah - Jumlah lembaga PAUD yang - menerima bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) lembaga PAUD.
			Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga PAUD yang mendapatkan dana BOP - Jumlah siswa anak PAUD memperoleh BOP - Pengadaan dan penggandaan buku tentang akhlak mulia bagi guru dan siswa (PAUD) RA - Pengadaan dan penggandaan buku tentang iman dan moral Katolik bagi guru dan siswa (PAUD) Taman Seminari
			Pengendalian Pengawasan Perijinan Ijin	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan

			<p>Operasional Pendirian Lembaga PAUD</p>	<p>an program satu kelurahan satu PAUD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak
			<p>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah yang sosialisasi secara <i>online</i> / media massa terkait Layanan PAUD - Tingkat kehadiran anak di lembaga PAUD - Jumlah Anak Inklusi baik Sensorik ataupun Motorik peserta didik PAUD Yang Berkebutuhan Khusus - Jumlah lembaga yang memberikan kesehatan berupa makanan bergizi, layanan berupa layanan kesehatan secara Berkala, perlindungan berupa

				<p>pengawasan terhadap anak didik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD Inklusi - Pelaksanaan Lomba Lembaga PAUD berkarakter pada Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) PAUD
			<p>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</p>	<p>Jumlah sosialisasi dan pendampingan pada lembaga mitra satuan PAUD dalam kesiapan PAUD 1 tahun pra SD</p>
			<p>Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga PAUD yang memberikan Pengetahuan berbagai agama di Indonesia melalui kurikulum keagamaan yang di ajarkan - Jumlah Lembaga PAUD yang telah menerapkan kurikulum 2013

				<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga PAUD telah mengimplementasikan standar penilaian PAUD - Lembaga PAUD telah mengimplementasikan standar penilaian, kurikulum PAUD yang didalamnya bertujuan untuk pendidikan karakter yang berkualitas - Pendidik PAUD mendapat ilmu dan menerapkannya pada proses belajar lembaga PAUD / Taman Posyandu
--	--	--	--	---

Tabel 3.4 Indikator Output PAUD HI Indikator Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah posyandu yang menyelenggarakan program BKB HI - Jumlah kelompok BKB HI yang mendapat

				pembinaan KKBPk - Jumlah Posyandu yang menyelenggara kan kegiatan pengasuhan anak usia dini
2.	Pemenuhan Hak Anak	Kelembagaan PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	- Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik - Jumlah lembaga yang di fasilitasi untuk menyelenggara kan TEPAK - Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik - Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitas dalam pengembangan lingkungan ramah anak - Jumlah kecamatan yang

				<p>mendapatkan pelatihan pengasuhan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah data dan hasil analisis tentang pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan keluarga - Jumlah unit ruang bermain anak yang terstandarisasi
			<p>Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan - Jumlah kecamatan yang memiliki forum keluarga pelopor dan pelapor pengasuhan anak berbasis hak anak - Jumlah kelurahan yang memiliki forum keluarga

				pelopor dan pelapor pengasuhan anak berbasis hak anak
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan perlindungan dan pengasuhan saat orang tua sedang bekerja - Jumlah lembaga PATBM dan Pos Cinta yang memahami pelaksanaan pengasuhan serta menjamin tumbuh kembang anak dalam keluarga - jumlah lembaga yang mendapat penguatan dan pengasuhan anak berbasis anak
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengendalian Pengawasan Perijinan Ijin Operasional Pendirian Lembaga PAUD	Jumlah Kecamatan memiliki sekurang-kurangnya satu lembaga PAUD penyelenggaraan

			pendidikan dan pelibatan keluarga dalam pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahun
		Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	Jumlah lembaga/satuan pendidikan PAUD yang mendapatkan Bantuan Operasional Daerah PAUD dan DAK Non Fisik bagi Lembaga PAUD
	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Anak yang masuk lembaga PAUD HI dan mendapatkan pelatihan kemampuan dan kemandirian - Jumlah lembaga yang memberikan pelatihan kepada orang tua agar mengerti, paham dan menerapkan arti pentingnya pendidikan keluarga bagi

				<p>tumbuh kembang anak usia dini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga yang menerapkan dan mengaplikasikan pentingnya pendidikan keluarga pada lingkungan keluarga - Jumlah peserta didik kelompok bermain - Jumlah lembaga yang mempunyai SOP untuk mengidentifikasi anak yang menjadi korban kekerasan
		Proses Penyelenggaraan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Taman Posyandu sebagai mitra PAUD dan Pendidik PAUD
4.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang telah memenuhi standar pelayanan pengasuhan anak

				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga yang menyediakan layanan/program untuk anak-anak dari kelompok marginal, rentan, dan beresiko seperti anak jalanan, anak korban pengungsian, dll
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang mampu tata laksana Kekerasan Terhadap Perempuan Anak (KtP/A) - Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
6.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Akta Kelahiran yang diterbitkan - Prosentase anak yang mendapatkan Akte Kelahiran

		Penyelenggaraan pencatatan sipil	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah layanan pembuatan Akte Kelahiran di PAUD, bazar pelayanan, Posyandu
7.	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak yang mendapatkan KIA - Prosentase anak yang mendapatkan KIA
8.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sosialisasi Hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran, KIA secara gratis
9.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten / Kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase penurunan jumlah korban kekerasan terhadap anak - Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap anak
			Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan	Peningkatan sumber daya lembaga dalam

			kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak
10.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kampanye ketertiban dan keamanan berlalu lintas di jalan
11.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti	Jumlah anak yang dalam situasi darurat, mendapatkan pengasuhan sementara dalam lembaga atau keluarga
12.	Pemberdayaan dan Pengenalan Keluarga Sakinah	Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah reguler	Orientasi nikah keluarga sakinah	Bimbingan perkawinan pra nikah reguler
		Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah mandiri	Orientasi nikah keluarga sakinah	Bimbingan perkawinan pra nikah mandiri
13.	Pengenalan tentang Keluarga Sakinah	Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah remaja usia nikah	Pengetahuan keluarga sakinah	Bimbingan pra nikah usia remaja usia nikah (21 tahun)

Tabel 3.5 Indikator Output PAUD HI Indikator Tata Kelola

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelurahan yang memiliki Juknis untuk mengatur alokasi dana kelurahan untuk program PAUD-HI - Memiliki Peraturan Kepala Daerah mengenai PAUD-HI - Terlaksananya koordinasi terkait RAD PAUD-HI - Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Aksi Daerah RAD PAUD-HI - Memiliki gugus tugas - Memiliki Alokasi Anggaran (APBD) untuk pengembangan PAUD-HI - Integrasi perencanaan dan penganggaran PAUD HI dalam Dokumen RKPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
2.	Pemenuhan Hak Anak	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Jumlah profil anak yang terpilah gender
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah kelurahan yang memiliki alokasi anggaran untuk Pengembangan PAUD-HI SK Gugus Tugas PAUD HI tingkat Kecamatan
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Mengintegrasikan rencana kegiatan terkait PAUD HI dalam RKPD

BAB IV

TATA KELOLA

4.1 Prinsip penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif

Penyelenggaraan PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :

1. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
2. pelayanan yang berkesinambungan yakni layanan yang dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun;
3. pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
5. partisipasi masyarakat;
6. berbasis budaya yang konstruktif; dan
7. tata kelola yang baik.

4.2 Gugus Tugas PAUD HI

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas PAUD HI Kota Probolinggo mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, namun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Susunan keanggotaan tersebut adalah :

- a. Pembina : Wali Kota Probolinggo;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- c. Wakil Ketua I : Kepala BappedaLitbang Kota Probolinggo;
- d. Wakil Ketua II : Ketua TP PKK/Bunda PAUD Kota Probolinggo;
- e. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo;
 3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;
 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 7. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo;
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;

10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo;
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo;
12. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo;
13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo;
14. Direktur UOBK RSUD Moh. Saleh Kota Probolinggo;
15. Camat Kademangan Kota Probolinggo;
16. Camat Wonoasih Kota Probolinggo;
17. Camat Mayangan Kota Probolinggo;
18. Camat Kanigaran Kota Probolinggo;
19. Camat Kedopok Kota Probolinggo;
20. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;
21. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;
22. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;
23. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo;
24. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
25. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
26. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
27. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
28. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;
29. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;
30. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;

31. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan pada UOBK RSUD dr. Moh. Saleh;
32. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo;
33. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
34. Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
35. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
36. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
37. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
38. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
39. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
40. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo;
41. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo;
42. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim pada Polresta Probolinggo;
43. Ketua Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Probolinggo;
44. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo;
45. Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo;
46. Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo;
47. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo;
48. Ketua Forum Tanggung jawab Sosial Perusahaan Kota Probolinggo;
49. Ketua Dewan Pendidikan Kota Probolinggo;
50. Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI);
51. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kota Probolinggo;
52. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kota Probolinggo;
53. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kota Probolinggo;
54. Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini.

4.3 Mekanisme Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Koordinasi di Kota Probolinggo menjadi tugas Sekretaris Daerah Kota Probolinggo selaku Ketua Gugus Tugas PAUD HI Kota Probolinggo, yang bertugas untuk :

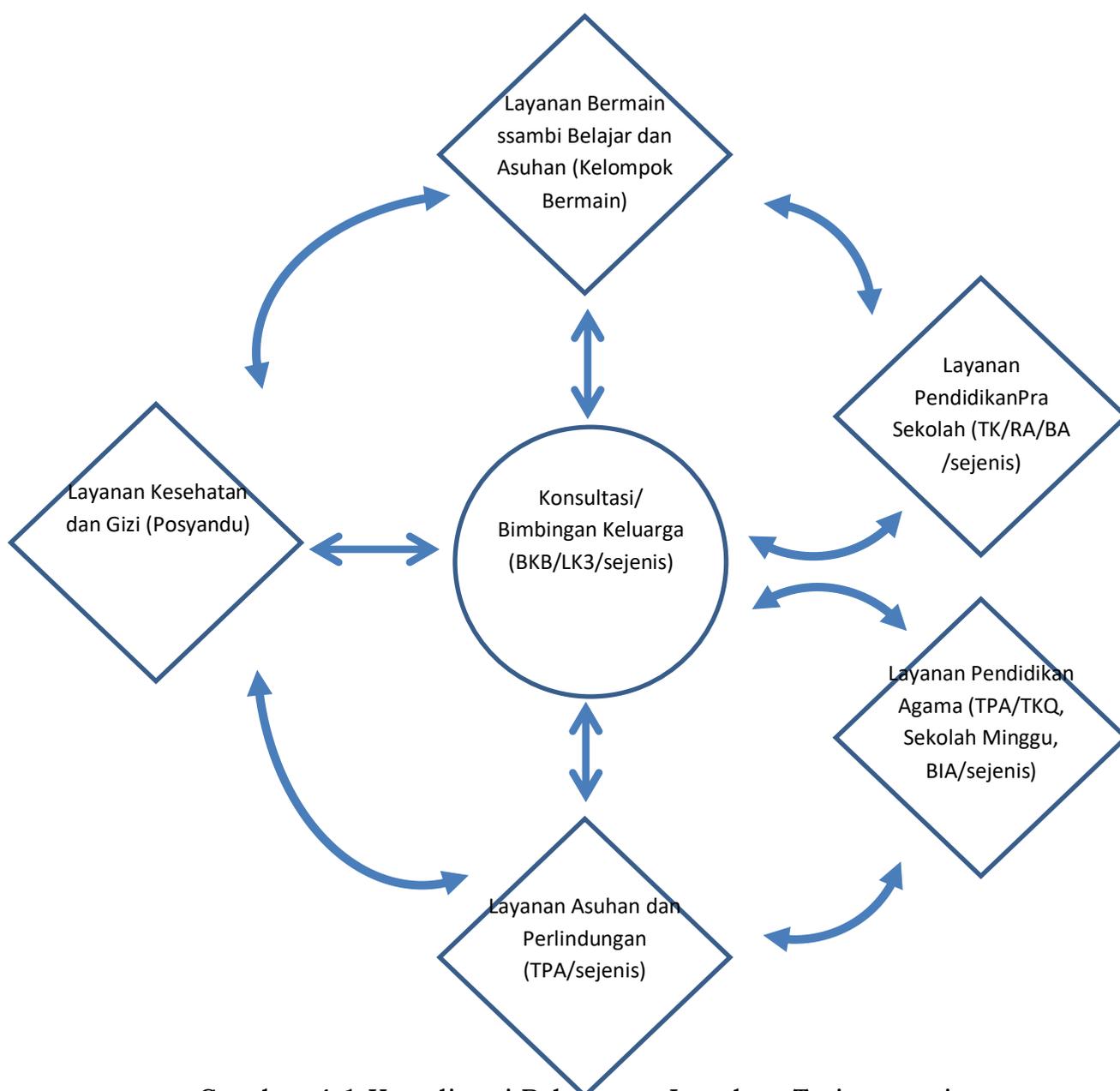
- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kota Probolinggo;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Probolinggo.

4.3.1 Koordinasi Perencanaan

- a. Perencanaan program pengembangan anak usia dini yang dilakukan dalam rangka rencana pembangunan Daerah tahunan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- b. Perencanaan tahunan anak usia dini dilaksanakan menurut Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Bappedalitbang yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Forum untuk mengoordinasikan usul perencanaan program pengembangan anak usia dini pada tingkat Kota adalah Musrenbang kota, yang membahas usulan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan. Hasil dari Musrenbang Kabupaten dibahas dalam forum Musrenbang tahunan yang dikoordinasikan Bappedalitbang.
- d. Usulan perencanaan yang dibahas dalam forum Musrenbang adalah yang penyelenggaraannya dibiayai pemerintah baik yang kelembagaannya didirikan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Namun, kegiatannya ada yang diusulkan untuk dapat dibiayai pemerintah.
- e. Perumusan usulan perencanaan tersebut dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yaitu dari kalangan instansi pemerintah terkait, lembaga masyarakat, dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan anak usia dini sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat. Perumusan usulan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan.
- f. Gugus Tugas Kota menyusun kompilasi perencanaan program pengembangan anak usia dini di tingkat Daerah dan menembuskannya ke Kecamatan dan Kelurahan.

4.3.2 Koordinasi Pelaksanaan

- a. Dalam penyelenggaraan PAUD HI, pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk a) melakukan bimbingan teknis; b) melakukan supervisi; c) melakukan advokasi; dan d) melakukan pelatihan.
- b. Pelaksanaan pengembangan anak usia dini di tingkat Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinsos PPPA, dan mitra pengembangan anak usia dini pada tingkat kota. Di tingkat pemerintah Daerah, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo sebagai Ketua Gugus Tugas PAUD HI Kota Probolinggo.
- c. Dalam penyelenggaraan PAUD HI, Pemerintah Kota Probolinggo bertanggung jawab untuk a) melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini; b) melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan; c) melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini; d) melakukan advokasi; e) memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan f) melakukan evaluasi dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan di kecamatan adalah tanggung jawab camat dengan pelaksana teknis oleh Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan pengembangan anak usia dini dan mitranya di kecamatan.
- e. Pelaksanaan di Kelurahan menjadi tanggung jawab Lurah, dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan di kelurahan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui pertemuan secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dalam pertemuan tersebut dibahas kebijakan pengembangan anak usia dini dan standar prosedur pelaksanaan yang diperlukan, serta pemecahan/jalan keluar dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini.



Gambar 4.1 Koordinasi Pelayanan Lengkap Terintegrasi
 Sumber : RAN PAUD HI, 2021

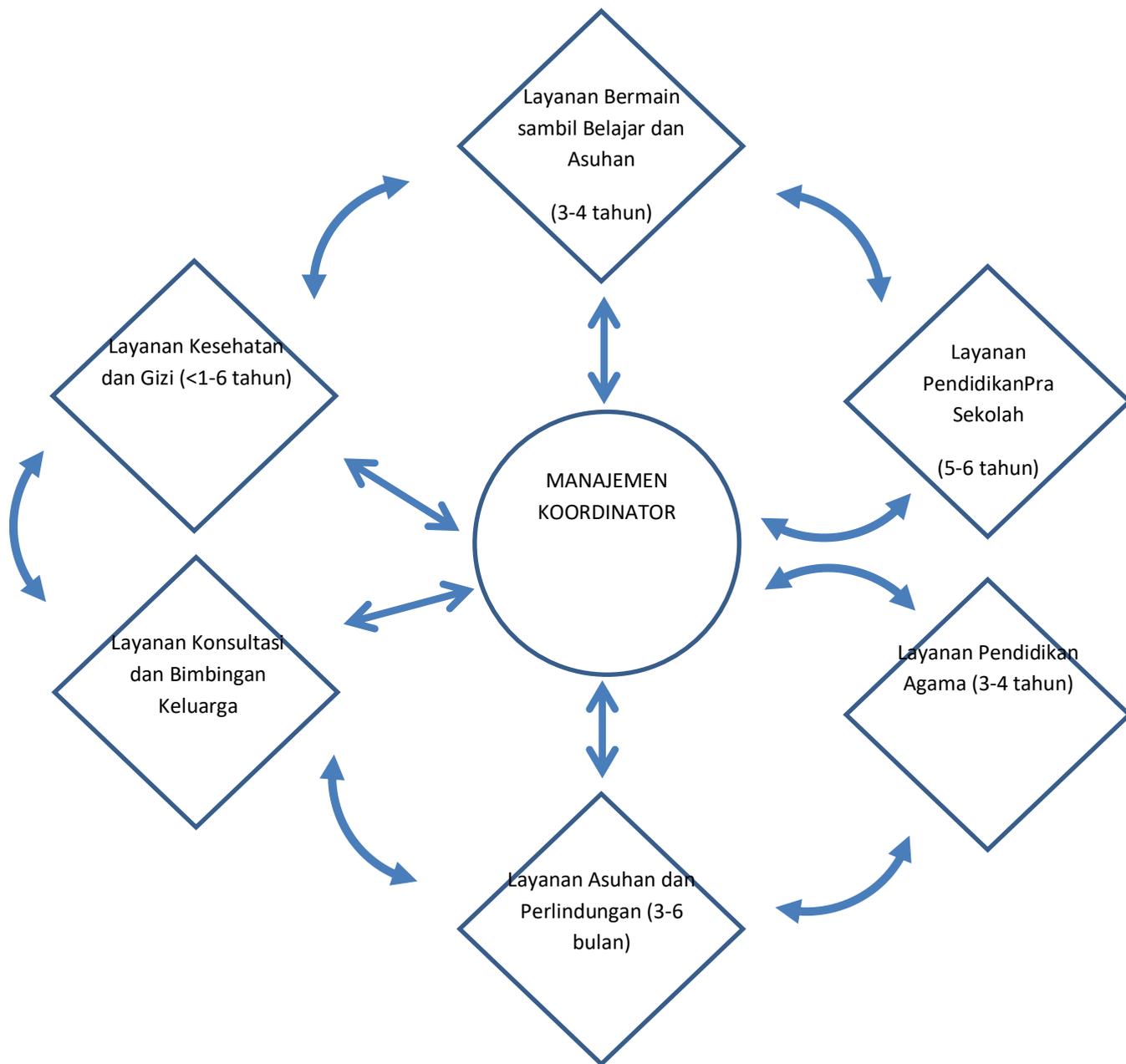
Mekanisme koordinasi juga dilakukan oleh dan antar lembaga penyelenggara pelayanan anak usia dini, baik yang melakukan pelayanan dengan tipe Pelayanan Lengkap dan Terintegrasi maupun Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap.

- Koordinasi dilakukan oleh setiap jenis lembaga penyelenggara pelayanan anak usia dini dengan lembaga penyelenggara lainnya.
- Koordinasi dilakukan agar pelayanan dapat diberikan secara lengkap, dilakukan secara terpadu dan sistematis.
- Koordinasi antar lembaga pelayanan PAUD HI tersebut saling melengkapi.
- Kerja sama yang terencana dan tersistem tersebut harus memperhatikan kebutuhan masing-masing kelompok umur anak usia dini.
- Komunikasi secara periodik oleh jaringan kerja sama pelayanan PAUD HI untuk melakukan evaluasi bersama.

- Setiap lembaga pelayanan PAUD HI sesuai dengan kemampuannya dapat melengkapi jenis pelayanan atau merujuk layanan yang masih diperlukan ke penyelenggara lainnya.
- Setiap lembaga pelayanan pengasuhan PAUD HI yang berpotensi memfasilitasi pelayanan lain dapat menyediakan fasilitas lokasi untuk pelayanan tersebut.

4.3.3 Koordinasi Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap

- a. Tipe Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap yang memiliki lebih dari satu manajemen tetap perlu dikoordinasikan oleh satu Penanggung jawab (Koordinator) agar pelayanan yang utuh dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap yang berbasis komunitas, menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga mungkin tidak mencakup semua jenis pelayanan, misalnya Kelompok Bermain dilakukan simultan dengan Posyandu dan pendidikan prasekolah serta kegiatan BKB, tetapi tidak melakukan pelayanan penitipan anak, karena masyarakat tidak membutuhkan. Namun, perlu mendapat perhatian bahwa anak usia dini tetap dapat dilayani secara utuh.
- c. Optimalisasi media integrasi yang dapat didayagunakan, seperti Forum PAUD.
- d. Gugus Tugas Kota atau Bappedalitbang Kota Probolinggo menyusun kompilasi laporan triwulan kota dengan menggunakan laporan triwulan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas program pengembangan anak usia dini.
- e. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan anak usia dini disampaikan Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinsos PPPA, kepada Ketua Gugus Tugas, dengan tembusan pada Bappedalitbang
- f. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan anak usia dini tersebut, Bappedalitbang melakukan evaluasi perencanaan rencana kerja periode sebelumnya guna penyusunan rencana kerja untuk periode dua tahun berikutnya.
- g. Sekretaris Daerah dan Bappedalitbang menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan triwulan SKPD tersebut untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan pengembangan anak usia dini, serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.



Gambar 4.2 Koordinasi Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap
 Sumber : RAN PAUD HI, 2021

4.3.4 Mekanisme Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu kunci dari pemantauan dan evaluasi adalah data dan informasi yang akurat. Data dan informasi mengenai proses dan hasil pembangunan pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini perlu dikelola secara sistemik, transparan, dan berdaya guna di semua tingkat pemerintahan dan dikumpulkan secara rutin melalui :

- a. mengefektifkan gugus tugas PAUD HI di Kota untuk melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI;
- b. mengintegrasikan data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi untuk bahan perencanaan dan pengalokasian anggaran sebagai laporan dan bahan diskusi Daerah;

- c. melibatkan Perangkat Daerah yang mempunyai mandat untuk pengawasan, lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan media massa termasuk forum anak, untuk menjadi bagian dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana aksi di Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan pelaporannya pada Ketua Gugus Tugas PAUD HI Kota Probolinggo; dan
- e. Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI Kota Probolinggo menyusun kompilasi laporan data dan informasi hasil pemantauan secara berkala triwulan dan hasil evaluasi tahunan.

4.4 Mekanisme Pelaporan

- a. Lembaga penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini pada tingkat kelurahan menyusun laporan perkembangan program pelayanan dan menyampaikan laporan kepada Lurah. Laporan ini mencakup antara lain pemantauan pelaksanaan kegiatan (jadwal kegiatan harian dan bulanan), pelaksanaan pelayanan, kecukupan tenaga operasional dan pengelola, serta penggunaan anggaran.
- b. Lurah menyusun kompilasi laporan dari penyelenggara dan disampaikan ke Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait di tingkat kecamatan.
- c. Kecamatan melakukan kompilasi laporan dari tingkat desa/kelurahan dan menyampaikan kompilasi laporan tersebut ke Gugus Tugas Kota.

4.5 Sekretariat PAUD HI

Di tingkat Kota Probolinggo dibentuk Sekretariat PAUD HI yang dikoordinasikan di Bappedalitbang Kota Probolinggo, yang mempunyai tugas :

1. memberikan dukungan teknis operasional kepada Gugus Tugas;
2. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, advokasi, integrasi, dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas;
3. menyiapkan bahan rencana program kerja Gugus Tugas;
4. memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Gugus Tugas dengan SKPD yang menjadi anggota Gugus Tugas;
5. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Gugus Tugas; dan
6. melaksanakan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Keanggotaan Kesekretariatan Gugus Tugas PAUD HI Kota Probolinggo adalah:

a. Ketua

1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo Kota Probolinggo; dan

2. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.

b. Anggota

1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
2. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
5. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
6. Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo;
7. Fungsional Perencana Muda pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo Kota Probolinggo;
8. Analis Perencana Program dan Kegiatan pada Subbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo; dan
9. Pengelola Program dan Kegiatan pada Subbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAD PAUD HI) Kota Probolinggo Tahun 2022-2024 merupakan sebuah upaya terpadu antar pemangku kepentingan, baik pemerintah dan non pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pengembangan anak usia dini secara menyeluruh di Kota Probolinggo. Keberhasilan penerapan strategi PAUD HI bagi semua anak tanpa kecuali tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, keberhasilan upaya ini juga sangat tergantung dari kesepakatan antara pemerintah pusat dan Daerah mengenai urgensi optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai elemen paling mendasar dari pembangunan nasional. Dengan demikian, semua pihak ikut bertanggung jawab (akuntabel) untuk menghasilkan luaran dan dampak yang positif konstruktif.

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 66 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
 KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022-2024

Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI Kota Probolinggo Tahun 2022-2024
 Bidang Kesehatan

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur	Meningkatnya jumlah anak usia 0-6 tahun yang mendapatkan layanan dalam bidang kesehatan dan gizi	Meningkatnya Kesehatan Ibu	Jumlah Calon Orang Tua yang mengikuti tes prenatal	Orang Tua yang mengikuti Tes Prenatal	Orang tua yang mengikuti Tes Prenatal	Orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10	10	10	304,494,000	351,204,000	386,324,400	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
2				Jumlah Ibu yang mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan	Pemeriksaan kehamilan	adanya Ibu Hamil yang diperiksa	Orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
3				Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti pelatihan pemeriksaan kehamilan	Pelatihan pemeriksaan ibu hamil pada Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yg terlatih Pemeriksaan Ibu Hamil	Orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB

4				Presentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	Persalinan di fasilitas kesehatan	Jumlah Persalinan di Faskes	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	375,079,000	45,930,000	55,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
5				Presentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	Bumil mendapat pelayanan ANC (K4)	Presentase Bumil yang mendapat pelayanan ANC (K4)	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
6				Presentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	Kunjungan Neonatal pertama (KN1)	Presentase Kunjungan Neonatal pertama (KN1)	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97	97	97	5,000,000	18,510,000	25,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
7				Presentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Bumil KEK yang mendapat PMT	Adanya Bumil KEK yang mendapat PMT	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80	80	80	361,802,800	380,740,000	350,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
8				Presentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan	Bumil yang mendapat TTD 90 Tab selama Hamil	Adanya Bumil yang mendapat TTD 90 Tab selama Hamil	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	82	82	82	sama dengan nomor 07	sama dengan nomor 07	sama dengan nomor 07	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
9				Prevalensi anemia pada ibu hamil	Anemia pada Ibu Hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10	10	10	sama dengan nomor 07	sama dengan nomor 07	sama dengan nomor 07	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB

10				Kunjungan nifas (KF1 dan KF4) selama 40 hari pasca persalinan	Kunjungan Nifas (KF1 dan KF4) selama Pasca Salin	Adanya Kunjungan Nifas (KF1 dan KF4) selama Pasca Salin	kali	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	97	97	97	sama dengan nomor 04	sama dengan nomor 04	sama dengan nomor 04	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
11				Presentase bayi lahir mendapat inisiasi menyusui Dini (IMD)	Bayi Baru Lahir Mendapat IMD	Adanya Bayi Baru Lahir Mendapat IMD	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34	34	34	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
12				Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Bayi kurang 6 bln yang mendapat ASI Eksklusif	Adanya Bayi kurang 6 bln yang mendapat ASI Eksklusif	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38	38	38	sama dengan nomor 07	sama dengan nomor 07	sama dengan nomor 07	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
13				Presentase Kelompok Sasaran BKB yang mendapat promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas	Kelompok Sasaran BKB yang mendapat promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas	Jumlah Kelompok Sasaran BKB yang mendapat promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas	kelompok	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	68	68	68	0	0	0	Semesteran	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
14				Jumlah ibu yang mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan sesuai standart SPM Kesehatan	Ibu Hamil Yang mendapat pemeriksaan kehamilan sesuai SPM	Jumlah Ibu Hamil yang diperiksa sesuai SPM	orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB

15		Meningkatnya kualitas kesehatan anak berdasarkan pendekatan usia	Jumlah anak yang mendapatkan perawatan kesehatan	Anak yang mendapatkan perawatan kesehatan	Jumlah anak balita yang mendapatkan perawatan kesehatan	orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	100	100	100	5,000,000	34,400,000	35,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
16			Jumlah bayi yang mendapatkan kunjungan Neonatus 1 dan Neonatus 2	bayi yang mendapatkan kunjungan KN 1 dan KN 2	Adanya bayi yang mendapatkan kunjungan KN 1 dan KN 2	orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
17			Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan kampanye ASI Eksklusif	kelurahan melaksanakan Kampanye ASI Eksklusif	Adanya kelurahan melaksanakan Kampanye ASI Eksklusif	Kelurahan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30	30	30	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
18			Jumlah balita yang mendapatkan imunisasi lengkap	Pelayanan Imunisasi pada Balita	Jumlah Balita mendapatkan Imunisasi lengkap	orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	7534	7534	7534	42,686,400	11,050,000	11,050,000	Bulanan	Semester	Dinas Kesehatan PPKB
									Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah				170,130,000	170,130,000	170,130,000			
19			Jumlah balita yang mendapatkan pemeriksaan DDTK	Balita yg mendapatkan pemeriksaan DDTK	Jumlah Balita yg mendapatkan pemeriksaan DDTK	orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	500	500	500	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
20			Jumlah lembaga PAUD yang memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan	pengadaan Alat-alat P3K dan pojok UKS	Jumlah lembaga PAUD yang memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (Tersedianya Alat Alat P3K dan UKS)	lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	228	228	228	310,000,000	350,000,000	38,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Dinas Kesehatan PPKB

21			Jumlah penurunan angka stunting pada anak Usia Dini	Penurunan Angka Stunting pada anak usia dini	Jumlah Penurunan Angka Stunting pada anak usia dini	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	14%	14%	14%	sama dengan nomor 17	sama dengan nomor 17	sama dengan nomor 17	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
22			Jumlah lembaga PAUD yang menyelenggarakan penyediaan program makanan sehat	Penyediaan Makan sehat bagi peserta didik PAUD	Peserta Didik PAUD mrndapatkan asupan gizi tambahan berupa penyediaan makanan sehat	lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	228	230	230	3,750,000,000	3,750,000,000	3,750,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23			Presentase bantuan sarana UKS untuk (PAUD) RA	pengadaan Alat-alat P3K dan pojok UKS	Tersedianya Alat Alat P3K dan UKS	100%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	228	230	230	sama dengan nomor 22	sama dengan nomor 22	sama dengan nomor 22	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24			Jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan (termasuk Posyandu) minimum 8 kali dalam setahun untuk anak usia 0-1 dan untuk anak usia 1-5 Tahun, selama 4 Tahun terakhir minimum 8 kali			faskes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	10	10	10	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
25			Jumlah pengelola program KIA Dinas Kesehatan Kota, Tenaga Kesehatan Puskesmas	Pengelola Program KIA dinkes dan Tenaga Kesehatan Puskesmas	Jumlah Pengelola Program KIA dinkes dan Tenaga Kesehatan Puskesmas	orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28	28	28	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	sama dengan nomor 01	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
26			Jumlah Pengurus HIMPAUDI Kota, Pengelola IGTKI, Guru PAUD/Guru TK Kota	Pelantikan Pengurus dan Pengelola HIMPAUDI, IGTKI, Guru PAUD/Guru TK Se Kota Probolinggo	Jumlah pengurus HIMPAUDI Kota, Pengelola IGTKI, Guru PAUD/Guru TK Kota	orang	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pembinaan dan Manajemen PAUD	114	114	114	-	10,000,000	20,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

27			Jumlah pengelola program Kesga Dinas Kesehatan Kota serta Tenaga Kesehatan di Puskesmas	Pengelola Program Kesga dinkes dan Tenaga Kesehatan Puskesmas	Jumlah Pengelola Program Kesga dinkes dan Tenaga Kesehatan Puskesmas	orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	28	28	28	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
28			Jumlah Tenaga Puskesmas yang terlatih pelayanan Kesehatan balita terintegrasi	Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita terintegrasi	Jumlah Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita terintegrasi	orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	21	21	21	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
29			Jumlah tenaga puskesmas yang terlatih pelayanan kesehatan balita MTBS	Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita MTBS	Jumlah Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita MTBS	Orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	10	10	10	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	sama dengan nomor 15	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
30			Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	Jumlah Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	95	95	95	sama dengan Nomor 18	sama dengan Nomor 18	sama dengan Nomor 18	Bulanan	Semester	Dinas Kesehatan PPKB
31			Persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	95	95	95	sama dengan Nomor 18	sama dengan Nomor 18	sama dengan Nomor 18	Bulanan	Semester	Dinas Kesehatan PPKB
32			Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang mendapatkan Imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan	Imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan pada Anak Usia 12-24 Bulan	Jumlah Anak Usia 12-24 Bulan yang mendapatkan Imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan	%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	95	95	95	sama dengan Nomor 18	sama dengan Nomor 18	sama dengan Nomor 18	Bulanan	Semester	Dinas Kesehatan PPKB

33			Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat prioritas pencegahan Stunting	Penetapan Lokus Stunting	Jumlah Kelurahan yang dijadikan lokus stunting	Kelurahan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10	20	29	sama dengan nomor 09	sama dengan nomor 09	sama dengan nomor 09	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
34			Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan penanganan Stunting	Sosialisasi Penanganan Stunting ke Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melakukan penanganan Stunting	Kelurahan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	29	29	29	sama dengan nomor 09	sama dengan nomor 09	sama dengan nomor 09	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
35			Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Usia 3-5 Tahun	PMT untuk anak usia 3-5 Th	Jumlah anak usia 3-5 tahun yang mendapatkan PMT	Orang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	< 18	< 18	< 18	sama dengan nomor 09	sama dengan nomor 09	sama dengan nomor 09	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
36			Persentase Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk	Puskesmas Mampu Tatatlaksana Gizi Buruk	Adanya Puskesmas Mampu Tatatlaksana Gizi Buruk	puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6	6	6	sama dengan nomor 07	sama dengan nomor 07	sama dengan nomor 07	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PAUD HI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022-2024

BIDANG PENDIDIKAN

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional	Meningkatnya akses dan partisipasi anak ke PAUD	Terwujudnya anak usia 5-6 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan dalam Partisipasi Kasar PAUD - Persentase anak usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD	Jumlah Anak Usia Dini (usia 5-6 tahun) yang mengikuti PAUD	Memberikan Sosialisasi Kepada Anak Usia 5-6 Tahun kepada Orang Tua Atau Wali yang Belum Mendapatkan Layanan Pendidikan	Jumlah yang Sosialisasi secara Online / Media Massa terkait Layanan PAUD	Orang	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	5,710	5,750	5,800	-	15,000,000	15,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur			Tingkat kehadiran anak di lembaga PAUD	Memberikan Pengawasan secara Berkala Terhadap Kehadiran Siswa Siswi Lembaga PAUD	Tingkat kehadiran anak di lembaga PAUD	100%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100%	100%	100%	-	10,000,000	10,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3				Jumlah anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses ke lembaga PAUD	Memberikan Stimulasi secara sensorik dan Motorik serta Pembentukan karakteristik Anak melalui layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Inklusi Baik Sensorik ataupun Motorik peserta didik PAUD Yang Berkebutuhan Khusus	Orang	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	65	85	90	310,000,000	350,000,000	400,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4				Lembaga PAUD yang mendapatkan dana BOP	Memberikan Bantuan Dana berupa BOP PAUD Daerah dan BOP PAUD DAK Non Fisik	Pelaksanaan pemberian Bantuan berupa BOP PAUD Daerah dan BOP PAUD DAK Non Fisik kepada lembaga PAUD	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	230	235	240	3,500,000,000	3,750,000,000	4,000,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5				Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan program satu kelurahan satu PAUD	Pembatasan Jumlah Lembaga PAUD agar tidak terjadi Lonjakan Lembaga PAUD di Setiap Kelurahan Kota Probolinggo	Jumlah PAUD HI	Kelurahan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengendalian Pengawasan Perijinan Ijin Operasional Pendirian Lemabaga PAUD	29	29	29	30,000,000	40,000,000	50,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6				Sosialisasi Penuntasan minimal PAUD 1 Tahun pra SD	Sosialisasi Penuntasan minimal PAUD 1 Tahun pra SD	Jumlah Sosialisasi dan Pendampingan pada lembaga mitra satuan PAUD dalam kesiapan PAUD 1 Tahun pra SD	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penilaian dan Kurikulum Lembaga PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	228	228	228	168,930,000	175,000,000	200,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7				Jumlah siswa anak PAUD memperoleh BOP	Memberikan Bantuan Dana berupa BOP PAUD Daerah dan BOP PAUD DAK Non Fisik	Pelaksanaan pemberian Bantuan berupa BOP PAUD Daerah dan BOP PAUD DAK Non Fisik kepada lembaga PAUD	Orang	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	8,350	8,400	8,450	Idem Point 4	Idem Point 4	Idem Point 4	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8			Meningkatnya kualitas layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD Holistik Integrative.	Memberikan Layanan Holistic Integratif terhadap seluruh Anak Didik PAUD berupa layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan dll	Jumlah lembaga yang memberikan Kesehatan Berupa Makan Bergizi, Layanan Berupa Layanan Kesehatan secara Berkala, perlindungan berupa pengawasan terhadap anak didik	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	228	228	228	Idem Point 3	Idem Point 3	Idem Point 3	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9				Jumlah guru TK yang tersertifikasi.	Diklat Pendidikan Profesi Guru (PPG)	168 Tenaga Pendidik PAUD	Orang	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kes	50	100	175	50,000,000	100,000,000	150,000,000	Triwulanan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Kesetaraan	etaraan									
10				Jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan berjenjang.	Workshop Tenaga Pendidik	Profesionalisme Tenaga Pendidik	Orang	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	110	170	214	100,000,000	150,000,000	175,000,000	Semesteran	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11				Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi.	Memberikan Sosialisasi Akreditasi dan mendata lembaga PAUD yang belum terakreditasi	Jumlah Lembaga yang telah terakreditasi dan adanya Lembaga yang mengajukan akreditasi pada BAN Akreditasi PAUD	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	95	100	120	3,671,000,000	3,700,000,000	3,750,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12				Persentase Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pemberian Bantuan Sarpras Kepada Lembaga PAUD Negeri dan Swasta	Jumlah Bantuan APE Bagi Lembaga PAUD Negeri dan Swasta	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	228	230	230	200,000,000	250,000,000	300,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13				Jumlah lembaga PAUD yang menerima bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) lembaga PAUD.	Pemberian Bantuan Sarpras Kepada Lembaga PAUD Negeri dan Swasta	Jumlah Bantuan APE Bagi Lembaga PAUD Negeri dan Swasta	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	228	230	230	200,000,000	250,000,000	300,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14				Jumlah PAUD yang menyelenggarakan PAUD Inklusi.	Pemberian Layanan Kepada ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) Inklusi	Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD Inklusi	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	18	20	20	Idem Point 3	Idem Point 3	Idem Point 3	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15				Jumlah lembaga PAUD umum yang menyediakan layanan keagamaan untuk anak dari berbagai agama.	Pemberian Pembelajaran atau Pengenalan Mengenai Ilmu Keagamaan Kepada Anak Didik PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang memberikan Pengetahuan berbagai agama di Indonesia Melalui kurikulum keagamaan yang diajarkan	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	228	228	228	170,000,000	200,000,000	200,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16				Jumlah Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Pengembangan Karir Tenaga Pendidik	Profesionalisme Tenaga Pendidik	orang	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	30	60	90	40,000,000	70,000,000	100,000,000	Semesteran	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17				Persentase PAUD yang melaksanakan kurikulum 2013	Sosialisasi Pembelajaran di lembaga PAUD dengan menggunakan Kurikulum 2013	Jumlah Lembaga PAUD yang telah menerapkan Kurikulum 2013	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	228	228	228	Idem Point 6	Idem Point 6	Idem Point 6	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18				Persentase jumlah PAUD yang mengimplementasikan standar penilaian PAUD	Sosialisasi Kurikulum Pembelajaran PAUD	Lembaga PAUD telah mengimplementasikan standar penilaian PAUD	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	228	228	228	Idem Point 6	Idem Point 6	Idem Point 6	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19				Jumlah Guru yang mendapatkan Bimtek Pendidikan Karakter	Workshop peningkatan kualitas tenaga pendidik	Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik PAUD	Orang	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	150	175	200	100,000,000	150,000,000	175,000,000	Semesteran	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20				Persentase (%) lembaga PAUD menyelenggarakan pendidikan karakter berkualitas	Sosialisasi Kurikulum Pembelajaran PAUD	Lembaga PAUD telah mengimplementasikan standar penilaian, Kurikulum PAUD yang didalamnya bertujuan untuk pendidikan karakter yang berkualitas	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	228	228	228	Idem Point 6	Idem Point 6	Idem Point 6	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21				Jumlah GPAI TK yang mengimplementasikan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di PAUD dan TK	Workshop Implementasi Tenaga Pendidik Agama Islam (PAUD)	Pendidikan Agama Islam Sejak Usia Dini	Orang	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	150	175	200	100,000,000	150,000,000	175,000,000	Semesteran	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22				Pengadaan dan pengadaan buku tentang akhlak mulia bagi guru dan siswa (PAUD) RA	Pengadaan Buku Perpustakaan Bagi Siswa dan Tenaga Pendidik PAUD	Buku Perpustakaan Bagi Siswa dan Tenaga Pendidik bagi TK Negeri dan Swasta sehingga Anak Didik Mampu dan Tahu serta mengenai Pengetahuan berbagai agama di Indonesia Melalui kurikulum keagamaan yang diajarkan	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	1	1	228	Idem Point 4	Idem Point 4	Idem Point 4	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23				Pelaksanaan Lomba Lembaga PAUD berkarakter	Adanya Lomba-lomba Pendidikan Karakter Bagi Pendidik dan Peserta Didik PAUD pada Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) PAUD	Pelaksanaan Lomba Lembaga PAUD berkarakter pada Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) PAUD	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1	1	1	Idem Point 1	Idem Point 1	Idem Point 1	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24				Jumlah guru yang mendapatkan Bimtek Kompetensi untuk Meningkatkan kualifikasi guru Taman Seminari	Workshop Pengembangan Karir Tenaga Pendidik PAUD	Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik PAUD	Orang	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	150	150	200	100,000,000	150,000,000	175,000,000	Semesteran	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25				Pengadaan dan pengadaan buku tentang iman dan moral Katolik bagi guru dan siswa (PAUD) Taman Seminari	Pengadaan Buku Perpustakaan Bagi Siswa dan Tenaga Pendidik PAUD	Buku Perpustakaan Bagi Siswa dan Tenaga Pendidik bagi TK Negeri dan Swasta	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	1	1	228	Idem Point 4	Idem Point 4	Idem Point 4	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26				Lomba lembaga (PAUD) Taman Seminari berkarakter	Adanya Lomba-lomba Pendidikan Karakter Bagi Pendidik dan Peserta Didik PAUD pada Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) PAUD	Guru dan Siswa Ikut Berpartisipasi pada lomba-lomba karakter pada Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) PAUD	Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1	1	1	Idem Point 1	Idem Point 1	Idem Point 1	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27		Terwujudnya anak usia 0-6 tahun yang mendapatkan stimulasi dalam bidang bahasa, sosial, moral, spiritual dan emosional.	Jumlah anak yang mendapatkan stimulasi baik secara fisik, emosional, dan kognitif	Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan mengenai perkembangan anak dan strategi untuk menstimulasinya.	Workshop Pendidikan Karakter pada anak usia dini	Meningkatnya Karakter pada Anak Usia Dini	Orang	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	200	200	200	175,000,000	175,000,000	175,000,000	Semesteran	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28				Jumlah kader Posyandu dan PKK yang mengikuti pelatihan mengenai perkembangan anak usia 0-3 tahun dan	Sosialisasi Perkembangan Anak PAUD dan Strategi Pendidik PAUD Untuk menstimulasi Siswa menjadi	Pendidik PAUD mendapat ilmu dan menerapkannya pada Proses Belajar lembaga PAUD / Taman Posyandu	Orang	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta didik dan Pembangunan Karakter	Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	228	228	228	Idem Point 6	Idem Point 6	Idem Point 6	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				strategi untuk menstimulasinya.	Lebih baik														
29				Jumlah anak yang memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar	Mendata Anak usia PAUD Pra SD dan memberikan pendampingan Pra Sekolah Dasar	Anak Didik PAUD Pra SD mendapatkan pendampingan dan kesiapan untuk melanjutkan pada jenjang Dasar	Orang	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	5,710	5,750	5,800	Idem Point 1	Idem Point 1	Idem Point 1	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30				Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak	Monitoring dan Evaluasi kepada lembaga PAUD terkait pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada anak	Jumlah Lembaga PAUD yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengendalian Pengawasan Perijinan Ijin Operasional Pendirian Lemabaga PAUD	228	228	228	30,000,000	40,000,000	50,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31				Jumlah anak yang mendapatkan stimulasi perkembangan fisik, social, emosional dan bahasa	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada lembaga PAUD kemudian mendata Anak PAUD atas perkembangan Fisik, Social, Emosional dan bahasa	Mengetahui Lembaga PAUD yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak	Orang	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	5,710	5,750	5,800	Idem Point 1	Idem Point 1	Idem Point 1	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PAUD HI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022-2024

BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN, PENGASUHAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK USIA DINI

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur	Terwujudnya anak yang mendapatkan hak pengasuhan	Anak mendapatkan Pengasuhan Positif	Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan dan pengasuhan saat orang tua sedang bekerja	Sosialisasi dan pembinaan perlindungan dan pengasuhan saat orang tua sedang bekerja	Jumlah peserta Sosialisasi dan pembinaan perlindungan dan pengasuhan saat orang tua sedang bekerja	orang	Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerahh kab/kota	100	125	150	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
2				Jumlah anak usia dini yang memiliki kemampuan dan kemandirian	Monitoring dan Evaluasi Peserta Didik di Lembaga Negeri maupun Swasta	Jumlah Anak yang masuk lembaga PAUD HI dan mendapatkan pelatihan kemampuan dan kemandirian	Orang	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	6,500	7,000	7,500	-	310,000,000	315,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3				Keluarga yang mempunyai anak balita memahami dan melaksanakan pengasuhan serta menjamin tumbuh kembang anak dalam keluarga.	Sosialisasi Melalui Poscinta dan PATBM terkait pemahaman dan pelaksanaan pengasuhan serta menjamin tumbuh kembang anak dalam keluarga	Jumlah lembaga PATBM dan Pos Cinta yang memahami pelaksanaan pengasuhan serta menjamin tumbuh kembang anak dalam keluarga	lembaga	Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerahh kab/kota	63	63	63	5,000,000	6,000,000	7,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
4				Jumlah anak yang dalam situasi darurat, mendapatkan pengasuhan sementara dalam lembaga	Pendampingan terhadap anak yang mendapatkan situasi darurat	Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan	Orang	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantarserta gelandangan pengemis di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti	-	-	-	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				atau keluarga															
5				Jumlah SDM yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik	Diklat KHA bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik	Orang	Pemenuhan Hak Anak	pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	100	200	300	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA (anggaran APBN)
6				Jumlah lembaga yang menyelenggarakan program pelatihan orang tua	Sosialisasi Pendidikan Keluarga dan Parenting	Jumlah lembaga yang memberikan pelatihan kepada Orang Tua agar mengerti dan paham dan menerapkan arti pentingnya pendidikan Keluarga bagi tumbuh kembang Anak Usia Dini	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	228	228	228	310,000,00 0	350,000,00 0	375,000,00 0	1 Tahun	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7				Jumlah lembaga PAUD dan Posyandu yang mendapat pelatihan pengasuhan Anak berbasis Hak Anak	Pendataan Pendamping Taman Posyandu	Jumlah Taman Posyandu sebagai mitra PAUD dan Pendidik PAUD	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Proses Penyeleangan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	228	228	228	168,000,00 0	175,000,00 0	180,000,00 0	1 Tahun	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8				Jumlah Posyandu yang menyelenggarakan program BKB HI	Posyandu yang menyelenggarakan program BKB HI (Bina Keluarga Balita Holistik Integratif)	Jumlah posyandu yang menyelenggarakan program BKB HI	Kelompok	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan	68	68	68	204,000,00 0	204,000,00 0	306,000,00 0	Bulanan	Semesteran	Dinas Kesehatan PPKB

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				(Bina Keluarga Balita Holistik Integratif)															
9				Jumlah kelompok BKB HI yang mendapatkan pembinaan KKBPB	Kelompok BKB HI yang mendapatkan Pembinaan KKBPB	Jumlah Kelompok BKB HI yang Mendapat Pembinaan KKBPB	Kelompok	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/ Pelatihan teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	68	68	68	10,200,000	10,350,000	10,350,000	Semesteran	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
10				Jumlah lembaga/satuan pendidikan PAUD memperoleh penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahun	Sosialisasi Pendidikan Keluarga dan Parenting	Jumlah Lembaga yang menerapkan dan meng alikasikan pentingnya pendidikan Keluarga pada lingkungan Keluarga	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	228	228	228	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	1 Tahun	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11				Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi Standar Pelayanan Pengasuhan Anak	Pembinaan terhadap LKSA terkait Standar Pelayanan Pengasuhan Anak	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi Standar Pelayanan Pengasuhan Anak	Lembaga	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesjahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	27	28	29	3,030,000	3,120,000	3,210,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12				Jumlah lembaga mendapatkan fasilitas untuk menyelenggarakan arakan TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga)	Sosialisasi dan pembinaan melalui lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan TEPAK	jumlah lembaga yang difasilitasi untuk menyelenggarakan TEPAK	Lembaga	Pemenuhan Hak Anak	pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	128	133	138	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
13				Jumlah orang yang difasilitasi pelatihan pengasuhan berbasis hak anak	Diklat KHA bagi tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik	Orang	Pemenuhan Hak Anak	pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	100	200	300	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA (anggaran APBN)
14				Jumlah lembaga mendapat penguatan pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak	Penguatan pengasuhan anak berbasis hak anak melalui PATBM dan POS CINTA	jumlah lembaga yang mendapat penguatan dan pengasuhan anak berbasis hak anak	Lembaga	Pemenuhan Hak Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerahh kab/kota	2	2	2	67,000,000	70,000,000	75,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15				Jumlah Kecamatan yang difasilitasi Dalam Pengembangan Lingkungan Ramah Anak	sosialisasi kampung ramah anak melalui kecamatan	jumlah kecamatan yang mendapat fasilitas dalam pengembangan lingkungan ramah anak	Kecamatan	Pemenuhan Hak Anak	pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha kewenangan kab/kota	advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	5	5	5	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
16				Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelatihan pengasuhan anak	Sosialisasi pelatihan pengasuhan anak melalui kecamatan	jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan pengasuhan anak	Kecamatan	Pemenuhan Hak Anak	pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha kewenangan kab/kota	advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	5	5	5	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
17				Data dan Hasil Analisis tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Keluarga dengan memperhatikan dimensi kewilayahan	Penyusunan Profil Anak	jumlah data dan hasil analisis tentang pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan keluarga	Dokumen	Pemenuhan Hak Anak	pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha kewenangan kab/kota	advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	1	1	1	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18				Rekomendasi hasil Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan	Rapat koordinasi sektoral	jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan	Dokumen	Pemenuhan Hak Anak	pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab kota	1	1	1	30,200,000	50,000,000	60,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
19				Jumlah Kecamatan yang memiliki forum keluargaPelopor dan Pelapor (2P) Pengasuhan Anak berbasis hak anak	Sosialisasi, pembentukan dan pembinaan keluarga pelopor dan pelapor pengasuhan anak berbasis hak anak melalui kecamatan	jumlah kecamatan yang memiliki forum keluarga pelopor dan pelapor pengasuhan anak berbasis hak anak	Kecamatan	Pemenuhan Hak Anak	pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab kota	5	5	5	32,950,000	35,000,000	40,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
20				Jumlah Kelurahan yang memiliki forum keluargaPelopor dan Pelapor (2P) Pengasuhan Anak berbasis hak anak	sosialisasi, pembentukan dan pembinaan keluarga pelopor dan pelapor pengasuhan anak berbasis hak anak melalui kelurahan	jumlah kelurahan yang memiliki forum keluarga pelopor dan pelapor pengasuhan anak berbasis hak anak	Kelurahan	Pemenuhan Hak Anak	pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab kota	29	29	29	0	0	0	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
21				Jumlah Anak Usia Dini mendapatkan pelayanan melalui kelompok bermain	Monitoring dan pendataan Jumlah Anak Usia Dini	Jumlah peserta didik kelompok bermain	Orang	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1,694	1,694	1,694	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	sama dengan nomor 06	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22				Jumlah Kecamatan memiliki sekurang-kurangnya satu lembaga PAUD penyelenggaraan Pendidikan dan pelibatan Keluarga dalam pengasuhan Anak sejak janin hingga Anak Usia 6 Tahun	Pendataan Lembaga PAUD melalui Ijin Operasional dan Perpanjangan Ijin Operasional	Jumlah Kecamatan memiliki sekurang-kurangnya satu lembaga PAUD penyelenggaraan Pendidikan dan pelibatan Keluarga dalam pengasuhan Anak sejak janin hingga Anak Usia 6 Tahun	Kecamatan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengendalian Pengawasan Perijinan Ijin Operasional Pendirian Lemabaga PAUD	5	5	5	10,000,000	15,000,000	20,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23				Jumlah lembaga/satuan pendidikan PAUD memperoleh penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga pengasuhan Anak sejak janin hingga Anak Usia 6 Tahun	Pemberian Dana Bantuan Operasional	Jumlah lembaga/satuan pendidikan PAUD yang mendapatkan Bantuan Operasional Daerah PAUD dan DAK Non Fisik bagi Lembaga PAUD	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	228	228	228	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24				Bertambahnya Kelembagaan Posyandu yang menyelenggarakan Kegiatan Pengasuhan Anak Usia Dini	Posyandu yang menyelenggarakan Kegiatan Pengasuhan Anak Usia Dini	Jumlah Posyandu yang menyelenggarakan Kegiatan Pengasuhan Anak Usia Dini	Lembaga	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan	68	68	68	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25				Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Reguler	Kegiatan Bimwin Pranikah reguler	Jumlah kelompok bimwin yang dibina	Angkatan	Pemberdayaan dan Pengenalan Keluarga Sakinah	Pelaksanaan Kegiatan Bimwin Pra Nikah Reguler	Orientas Keluarga Skinah	16	19	19	67,200,000	79,800,000	79,800,000	Tahunan	Tahunan	Kemenag
26				Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Mandiri	Penyuluhan Bimwin Pranikah mandiri	jumlah kelompok bimwin yang dibina	Pasangan	Pemberdayaan dan Pengenalan Keluarga Sakinah	Pelaksanaan Kegiatan Bimwin Pra Nikah Mandiri	Orientas Keluarga Skinah	100	100	100	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Kemenag
27				Bimbingan Pra Nikah Usia Remaja Usia Nikah (21 tahun)	Kegiatan Bimwin nikaah remaja usia nikah	Jumlah remaja usia nikah yang dibina	Angkatan	Pengenalan tentang Keluarga Sakinah	Pelaksanaan Kegiatan Bimwin Pra Nikah Remaja Usia Nikah	Pengetahuan Keluarga Sakinah	3	3	3	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Tahunan	Tahunan	Kemenag
28	Terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada	Terwujudnya anak-anak yang sejahtera dan bebas dari kekerasan	Meningkatnya jumlah anak yang mendapatkan pemenuhan hak anak	Jumlah Anak yang mendapatkan Akte Kelahiran	Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran	Dokumen Akta Kelahiran yang diterbitkan	Orang	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	5,000	5,000	5,000	94,369,000	103,805,900	114,186,490	Bulanan	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29				Jumlah Anak yang mendapatkan KIA	Pelayanan Penerbitan KIA	KIA yang dicetak	Orang	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	5,000	5,000	5,000	36,240,000	39,864,000	43,850,400	Bulanan	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30				Prosentase Anak yang mendapatkan Akte Kelahiran	Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran	Dokumen Akta Kelahiran yang diterbitkan	%	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	100	100	100	94,369,000	103,805,900	114,186,490	Bulanan	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31				Prosentase Anak yang mendapatkan KIA	Pelayanan Penerbitan KIA	KIA yang dicetak	%	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100	100	100	36,240,000	39,864,000	43,850,400	Bulanan	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32				Jumlah layanan pembuatan Akte Kelahiran di PAUD, Bazar Pelayanan, Posyandu	Pelayanan keliling pencatatan sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran	Unit	Program Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting	20	20	20	-	25,140,000	25,140,000	Semester	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										terkait pencatatan sipil									
33				Jumlah ruang bermain Anak (RBRA) yang terstandarisasi/ tersertifikasi	sosialisasi RBRA terstandarisasi melalui unit ruang bermain anak	jumlah unit ruang bermain anak yang terstandarisasi	Unit	Pemenuhan Hak Anak	pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah,non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	5	5	5	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
34				Jumlah lembaga yang menyediakan layanan/pro gram untuk Anak-anak dari kelompok marginal,rentan, dan beresiko seperti Anak jalanan, Anak korban pengungsi an,dll	Pembinaan terhadap LKSA terkait Standar Pelayanan Pengasuhan Anak	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan/program untuk Anak-anak dari kelompok marginal,rentan, dan beresiko seperti Anak jalanan, Anak korban pengungsi an,dll	Lembaga	Program Pemberdayaa n Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesjahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesjahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	27	28	29	sama dengan nomor 11	sama dengan nomor 12	sama dengan nomor 13	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
35				Sosialisasi Hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran, KIA secara gratis	Sosialisasi Hak Anak yang dilaksanakan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2	2	2	-	134,550,000	134.550.000	Semester	Tahunan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36				Jumlah Puskesmas yang mampu tata laksana KtP/A	Puskesmas Mampu Tata Laksana KtP/A	Jumlah Puskesmas yang mampu tata laksana KtP/A	Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab / Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	1	1	sama dengan Matrik Kesehatan indikator nomor 1	sama dengan Matrik Kesehatan indikator nomor 2	sama dengan Matrik Kesehatan indikator nomor 3	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB
37			Menurunnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan	Penurunan Jumlah Anak yang mengalami Kekerasan dan Eksploitasi	Penyuluhan/ Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Prosentase penurunan jumlah korban kekerasan terhadap anak	%	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	25	25	25	20,000,000	25,000,000	30,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
38				Jumlah Lembaga PAUD yang memiliki SOP untuk mengidentifikasi Anak yang menjadi korban Kekerasan	Sosialisasi Lembaga PAUD yang memiliki SOP untuk mengidentifikasi anak yang menjadi korban kekerasan	Jumlah lembaga yang mempunyai SOP untuk mengidentifikasi Anak yang menjadi korban Kekerasan	Lembaga	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	228	228	228	-	50,000,000	100,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39				Lembaga Kepolisian yang memiliki layanan Pengaduan Ramah Anak	Layanan Pengaduan Ramah Anak	Jumlah Layanan Pengaduan Ramah Anak	Lembaga	-	-	-	1	1	1	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Polres
40				Kampanye tertib, aman dan selamat di jalan	Sosialisasi Kampanye Ketertiban dan Keamanan berlalu lintas di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kampanye Ketertiban dan Keamanan berlalu lintas di Jalan	Kegiatan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	4	6	6	10,000,000	15,000,000	15,000,000	Triwulanan	Semester an	Dinas Perhubungan

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41				Jumlah Lembaga yang difasilitasi untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus	Pembinaan manajemen kasus khusus anak tim P2TP2A	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap anak	%	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	100	100	100	40,000,000	50,000,000	60,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
42				Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Pelatihan/ Sosialisasi pencegahan / penanganan kekerasan terhadap anak	Peningkatan sumber daya lembaga dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak	%	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten / kota	100	100	100	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA
43				Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih Tata Laksana Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Tenaga kesehatan Terlatih Tata Laksana KiP/A	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih Tata Laksana Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Tenaga Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2	2	2	sama dengan Matrik Kesehatan indikator nomor 1	sama dengan Matrik Kesehatan indikator nomor 2	sama dengan Matrik Kesehatan indikator nomor 3	Tahunan	Tahunan	Dinas Kesehatan PPKB

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PAUD HI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022-2024

BIDANG TATA KELOLA

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah	Terciptanya tata kelola terkait PAUD-HI	Terciptanya Tata Kelola PAUD HI di tingkat kelurahan	Jumlah kelurahan yang memiliki Juknis untuk mengatur Alokasi Dana kelurahan untuk Program PAUD-HI	Koordinasi Penyusunan Peraturan Alokasi Dana kelurahan untuk Program PAUD-HI	Regulasi mengatur Alokasi Dana kelurahan untuk Program PAUD-HI	Dokumen	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	-	1	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Tahunan	Tahunan	Bappeda Litbang
2			Terciptanya tata kelola PAUD-HI di tingkat kota/ kabupaten	Memiliki Peraturan Kepala Daerah mengenai RAD PAUD-HI	Penyusunan Peraturan Walikota PAUD HI	Peraturan Walikota tentang PAUD HI	Dokumen	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	1	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Bappeda Litbang
3			Memiliki RAD PAUD-HI	Penyusunan RAD PAUD HI	RAD PAUD HI Kota Probolinggo 2022-2024	Dokumen	Pembangunan Daerah	Pembangunan Manusia	Pembangunan Bidang Pemerintahan	1	1	1	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Bappeda Litbang	
4			Terlaksananya koordinasi terkait RAD PAUD-HI	Pelaksanaan Koordinasi terkait PAUD HI	Koordinasi terkait PAUD HI	Kegiatan				2	2	2	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semester	Semester	Bappeda Litbang	
5			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan asistensi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD-HI	Sosialisasi Peraturan Walikota dan RAD PAUD HI	Sosialisasi RAD PAUD HI	Kegiatan				1	1	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semester	Semester	Bappeda Litbang	
6			Adanya database terpilah gender untuk anak usia dini 0-6 tahun	Profil anak	Jumlah Profil Anak yang terpilah gender	Dokumen	Pemenuhan Hak Anak	pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah,non pemerintah dunia usaha kewenangan kab/kota	advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah,non pemerintah, media dan dunia usaha	1	1	1	0	0	0	Tahunan	Tahunan	Dinas Sosial PPPA	

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										kewenangan kab/kota									
7				Memiliki Peraturan Kepala Daerah yang mengatur PAUD wajib minimal 1 Tahun pra SD	Peraturan Walikota terkait Pra SD	Jumlah Peraturan Walikota terkait 1 Tahun Pra SD	Dokumen	-	-	-	1	1	1	0	0	0	Tahunan	Tahunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	Terwujudnya komitmen untuk melaksanakan PAUD-HI dari berbagai unsur stakeholder	Terwujudnya komitmen untuk melaksanakan PAUD-HI di tingkat kelurahan	Jumlah Kelurahan yang memiliki Alokasi Anggaran untuk Pengembangan PAUD-HI	Sosialisasi peningkatan PAUD HI	Peningkatan pemahaman PAUD HI	Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1	1	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Tahunan	Tahunan	Kecamatan
Memiliki Gugus Tugas Kecamatan yang mengkomodir semua kelurahan				Pembentukan dan Sosialisasi Gugus Tugas Kecamatan	Meningkatkan kinerja gugus tugas dalam peningkatan PAUD HI di Kelurahan			Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1	1	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Tahunan	Tahunan	Kecamatan
				Menyusun SK Kepengurusan Gugus Tugas PAUD HI Kecamatan	SK Gugus Tugas PAUD HI tingkat Kecamatan	SK	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1	1	1	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Kecamatan	
10			Terwujudnya komitmen untuk melaksanakan PAUD-HI di tingkat kota	Memiliki Gugus Tugas	Penyusunan SK Gugus Tugas PAUD HI	SK Gugus Tugas PAUD HI tingkat Kota	SK	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	1	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Bappeda Litbang
11				Memiliki Alokasi Anggaran (APBD) untuk Pengembangan PAUD-HI	Identifikasi Program Kegiatan perangkat Daerah yang melaksanakan PAUD HI	Laporan Kegiatan dan Penganggaran terkait PAUD HI	Laporan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Manusia		1	1	1	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Bappeda Litbang

No	Tujuan Khusus PAUD HI	Outcome	Indikator Outcome	Indikator / Output RAN	Aksi	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target			Indikatif Pendanaan			Frekuensi		Pelaksana
											2022	2023	2024	2022	2023	2024	Pemantauan	Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12				Integrasi Perencanaan dan Penganggaran PAUD HI dalam Dokumen RKPD	Koordinasi penyusunan RKPD Kota Probolinggo	Mengintegrasikan Rencana Kegiatan terkait PAUD HI dalam RKPD	Dokumen	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	-	-	-	Tahunan	Tahunan	Bappeda Litbang

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

